PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telp. : (021) 7207372
E-mail : ippa@pkbi.or.id
www.pkbi.or.id

munas PKBI XV IPPF
KUPANG - NTT, 9 - 12 OKTOBER 2014

ANNUAL REPORT PKBI 2014

Peran PKBI dalam Menyongsong *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Penguatan Kapasitas Cabang
& Partisipasi Aktif Remaja dalam Organisasi

IPPA's Role in Welcoming Sustainable Development Goals (SDG's)

Strengthening Branch Capacity &
Active Participation of Youth in the Organization

VISI / *VISION*

Menjadi pusat unggulan pengembangan program dan advokasi kesehatan seksual dan reproduksi yang mandiri pada tahun 2020.

Become the center of excellence in 2020 by developing self reliant programs and advocacy on sexual and reproductive health rights.

MISI / *MISSION*

1. **Mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang menekankan pada pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, berbasis hak dan berperspektif gender melalui peningkatan peran PKBI yang profesional, kredibel, mandiri dan berkelanjutan.**

   To develop a center of information, education and counseling and sexual & reproductive health services, which emphasizes rights and gender perspective, high quality family planning services through the escalation on IPPA's role (professionalism, credible, autonomous and sustainable).

2. **Memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal Kesehatan Seksual dan Reproduksi.**

   To empower society to enable citizen to make responsible and behave responsibly towards their sexual and reproductive health and rights.

3. **Mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan dan komitmen atas pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi.**

   To advocate policy makers to ensure their support and commitment towards the fulfillment of sexual and reproductive health and rights.

STRATEGI / *STRATEGY*

1. **Mengembangkan model-model dan standar pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.**

   Developing models and standards on qualified sexual and reproductive health services to fulfill the needs in the society.

2. **Memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak seksual dan reproduksi bagi dirinya dan orang lain.**

   Empowering the community to enable them to fight for Sexual and Reproductive Health and Rights for themselves and others.

3. **Mengembangkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS.**

   Developing various efforts to halt the spread of STI's, HIV and AIDS.

4. **Melakukan advokasi di semua tingkatan organisasi kepada para pengambil kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi.**

   Advocating all policy makers in all areas and all levels of organization to ensure the fulfillment of sexual and reproductive and health & rights.

5. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya organisasi.**

   Enhancing institutional capacity and organizational resources.

Kunjungi Website Kami di
Visit Our Website at

www.pkbi.or.id

@keluargabesar.pkbi @suarapkbi

ANNUAL REPORT
PKBI 2014

Kata Pengantar

Introduction

Sepantasnya kita bersyukur karena telah menyelesaikan berbagai aktivitastahun 2014, yang merupakan akhir episode I (2010-2014) dari Rencaca Strategis 2010-2020, yang tentu saja banyak kegiatan penting dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikanterima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerjasama dengan PKBI untuk memperjuangkan pemenuhan kesehatan seksual-reproduksi, dengan berbasiskan pelayanan dan pengorganisasian masyarakat.

Padatahunini PKBI menyelenggarakan forum Musyarawah Nasional yang dilaksanakan empat tahun sekali, dan telah berhasil merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru, menetapkan Pengurus Baru, Kebijakan Organisasi, Mobilisasi Dana, Peran Remaja, Rumusan Prioritas Renstra (2015-2018) dan keputusan penting lainnya.

Suatu yang berbeda dari Munas sebelumnya adalah dalam rumusan kebijakan, yang saat ini dirumuskan sebagai "aturan" yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan rencana strategi dan Program kerja organisasi. Selanjutnya Rencana Strategi Nasional berhasil disusun skala prioritas 2014-2018 beserta indikatornya, berbasiskan hasil kinerja 2010-2014. Hal ini lebih memudahkan dalam menyusun Program Kerja danAnggranTahunan.

Tahun 2014 juga menyempurnakan system akuntansi berbasis software yang dikenal dengan "SAKU" untuk standarisasi akuntansi. Kegiatan penting lainnya adalah revisi pedoman ketenagakerjaan yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan yang berlaku, termasuk system remunerasi berbasis kinerja.

Perspektif pengembangan organisasi selain penguatan PKBI Cabang, yang perlu mendapat perhatian kita adalah mobilisasi dana untuk sustainability dan peningkatan skala kegiatan, termasuk perlunya merencanakan investasi dan pengembangan bisnis dengan seksama.

Oleh sebab,itu laporan tahunan kali ini mengetengahkan prosesi dan hasil Musyawarah Nasional sebagai laporan utama dan kegiatan lainnya yang memberikan kontribusi kepada eksistensi organisasi.

Nanang Munajat –
Pjs. Direktur Eksekutif PKBI

We are thankful that we have completed various activities in 2014, which also marks the end of the first episode (2010-2014) of Strategic Planning 2010-2020, that certainly consisted of many implemented important activities.

In this special occasion, we would like to thank all stakeholders who have been working intensively with IPPA in fighting for the fulfillment of sexual and reproductive health through community services and organizations.

This year, IPPA held the quadrennial National Conference (Munas), which resulted in the new articles of association, board members, organization's policy, fund mobilization, Youth Role, Strategic Planning Priority (2015-2018) and other important decisions.

Different from the previous Munas, this year we formulated "rules" within the policy to serve as guidelines in running the organization's strategic planning and work program. Moreover, Munas also successfully established the National Strategic Planning priority 2014-2018, along with its indicators (based on performance result in 2010-2014). This simplifies the preparation of the organization's Work Program and Annual Budget.

The year 2014 also enhanced IPPA's software-based accounting system called "SAKU" for accounting standardization. Another important activity successfully carried out last year was the revision of employment guidelines. The revision consisted of adjustments on the organization's growing needs and applied regulation, including the performance based remuneration system.

In regard to the organization development, besides IPPA Branch strengthening, we need to pay more attention to fund mobilization for activities improvement and sustainability. This includes a proper planning on business investment and development.

For that reason, this annual report sets forth the process and results of the National Conference and also other activities that have contributed to the existence of the organization.

Nanang Munajat –
Acting Executive Director

Address from The Chairman

Perjalanan program Keluarga Berencana di Indonesia diawali dengan dirintisnya PKBI di tahun 1957, yang kemudian programnya diadopsi menjadi Program Nasional pada tahun 1970-an dengan dibentuknya BKKBN dalam rangka mengendalikan dinamika pertumbuhan penduduk.

Tahun 2014 menjadi tahun yang istimewa untuk PKBI, karena tahun ini diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 sebagai agenda organisasi setiap empat tahun sekali. Munas merupakan forum tertinggi Perkumpulan yang pengambilan keputusannya ditentukan oleh perwakilan dari seluruh cabang dan daerah.

Munas menghasilkan keputusan penting berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru, garis kebijakan PKBI dan kepengurusan nasional untuk masa jabatan 2014-2018. Selain itu, penguatan cabang dan posisi forum remaja PKBI di dalam struktur Perkumpulan juga menjadi keputusan penting lainnya. Artinya, secara filosofis eksistensi basis anggota dan relawan berada di tingkat cabang.

Pada tahun ini juga kebijakan organisasi disusun secara sistemis dalam suatu dokumen dan disahkan dalam Munas, kebijakan tersebut merupakan rambu-rambu bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya, selanjutnya kebijakan tersebut akan direview pada forum Rapat Pleno Nasional yang diselenggarakan setahun sekali.

PKBI juga terus meningkatkan berkomitmen memberikan sumbangan pemikiran dan juga menggulirkan gerakan di tingkat akar rumput dalam rangka pencapaian agenda pembangunan pasca 2015. Untuk itu dalam seminar dan sidang-sidang Munas XV PKBI dibahas pemikiran terkait pemenuhan MDGs dan SDGs pasca 2015. Juga bersama jaringan LSM PKBI berjuang dengan gigih untuk amandemen UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam hal peningkatan usia minimum perkawinan.

Kegiatan penting lainnya di tahun ini adalah akreditasi tahap ke 2 untuk 14 PKBI Daerah, sehingga seluruh Daerah (26 PKBI Daerah) telah selesai diakreditasi dengan hasil 21 PKBI Daerah telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan, 4 PKBI Daerah mendapat akreditasi A dan 17 PKBI Daerah mendapat Akreditasi B.

Akhir kata, atas nama Pengurus Nasional. Kami ingin menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, mitra-mitra PKBI, relawan-relawan PKBI, dan para staf PKBI di seluruh Indonesia yang terus mendukung berbagai upaya PKBI selama ini. Semoga pada tahun-tahun mendatang PKBI dapat lebih berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi.

Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, Sp.OG
- Ketua Pengurus Nasional PKBI

The journey of Family Planning (KB) in Indonesia was pioneered with the establishment of IPPA in 1957. Later, the government adopted IPPA's program to become a National Program in 1970s through the establishment of BKKBN to control the dynamics of population growth.

2014 was a special year for IPPA, for in 2014 the organization held its quadrennial 15th National Conference (Munas). Munas is the highest association forum in which all decision making determined by representatives from all branches and chapters.

The Munas resulted in important decisions such as new articles of association, IPPA policy and national board for period of service 2014-2018. Other important decisions made in the last year's Munas were branch strengthening and IPPA Youth forum positioning within the organization structure, which philosophically speaking, indicated that member and volunteer based existence located in branch level.

In 2014, the organization also systematically wrote its policy and legalized it in the Munas. The policy consisted of guidelines for running organizational activities. Furthermore, this policy will be reviewed in the annual IPPA National Plenary meeting.

IPPA also continuously improves its commitment in contributing ideas and supporting grassroots movement for achieving post 2015 development agenda. Therefore, seminars and sessions in IPPA Munas XV brought up ideas on the fulfillment of MDGS and post 2015 SDGs. Besides that, IPPA also collaborated with NGO networks in fighting for the amendment of Marriage Law No. 1/1974 on the legal minimum age of marriage.

Another important activity in 2014 was the second phase of accreditation for 14 IPPA chapters. This resulted in the accreditation of all 26 IPPA Chapters (21 fully standardized, four A accredited and 17 B Accredited Chapters)

Finally, on behalf of IPPA National Board, we would like to thank the government of Republic of Indonesia, IPPA partners, volunteers and staff throughout Indonesia, for the continuous support to IPPA. Hopefully in the coming years IPPA can contribute more to the welfare of Indonesian people especially regarding sexual and reproductive health.

Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, Sp.OG
- Chair person board of IPPA

CONTENTS

Pemerintahan Baru, Post 2015 dan Peran Masyarakat Sipil
New Government, Post 2015 and the Role of Civil Society 5

Peran PKBI dalam menyongsong *Sustainable Development Goals* (SDGs)
The Role of IPPA in Welcoming Sustainable Development Goals (SDGs) 7

Cerita dari TIMOR
Story from TIMOR 12

Lawan Kekerasan Seksual di Sekolah
Fight Sexual Violence at Schools 14

16 **Siapkan Sustainability, IPPF Kembangkan *Social Enterprises***
Preparing Sustainability, IPPF Develops Social Enterprise

19 **Program Peduli Inklusi Sosial Pada Kelompok Waria dan Anak Rentan**
Care Program for Social Inclusion towards Transgender and Vulnerable Children

24 **Bahaya Perkawinan bagi Anak Perempuan**
The Downside of Marriage for Young Girls

27 **Memandirikan Cabang Melalui Bina Anaprasa**
Creating Self-Reliant Branch Through Bina Anaprasa

30 **Mengawal Keberlanjutan Melalui Kaderisasi Anggota Remaja**
Maintaining Sustainability Through Youth Member Regeneration

34 **Mobilisasi Dana, Investasi dan Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Organisasi**
Mobilization of Fund, Investment and Business in Improving Organization's Independency

38 **Governing Council IPPF-Headquarter**

39 **Peraturan Pemerintah No.61/2014**
Government Regulation Number 61/2014

40 **Merajut Komunikasi Kader Masyarakat dan Pemerintah**
Building Communication between Community Cadres and Government

41 **Peringatan HUT PKBI ke-57**
IPPA 57th Anniversary

42 **Laporan Keuangan**
Financial Report

46 **Galeri Foto**
Photo Gallery

Pemerintahan Baru, Post 2015 dan Peran Masyarakat Sipil

New Government, Post 2015 and the Role of Civil Society

Tahun 2015, MDGs atau Millenium Development Goals akan berakhir. Pemerintah dan masyarakat dunia kini tengah menyusun agenda pembangunan baru yang disebut Post 2015 Development Agenda atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam pertemuan United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) yang biasa disebut Rio+20, dalam pertemuan itu negara-negara anggota menyepakati untuk menyusun seperangkat tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan Milenium Development Goals (MDGs), SDGs merupakan kelanjutan pasca MDGs yang berdiri atas tiga pilar utama (sosial, ekonomi, lingkungan).

Penyusunan SDGs telah dilakukan mulai dari februari 2013 (OWG1) hingga februari 2014 dan hasil pertemuan itu didapat 21 Issu yang perlu dibahas untuk dijadikan agenda pembangunan setelah MDGs berakhir. Pada bulan Juli 2014, proses Open Working Group (OWG), dipimpin oleh negara anggota PBB, dan telah merumuskan laporan yang berisi proposal Sustainable Development Goals yang berisi 17 agenda pembangunan dan 169 target.

Dari 17 agenda pembangunan, issu lingkungan masih sangat kental mewarnai usulan SDGs ini. Perjuangan pada issu MDGs yang terkait dengan Kesehatan Ibu & Anak, HIV & AIDS, serta Kesehatan Reproduksi sampai saat ini masih jauh dari target. Maka dari itu, prioritas yang dilakukan saat ini melalui lobi masyarakat sipil terhadap pemerintah.

Berbagai pemerhati isu remaja khawatir bahwa akan terdapat kemungkinan ditinggalkannya prioritas pembangunan untuk generasi muda apabila prioritas ini tidak secara eksplisit ditetapkan dalam goal dan target SDGs. Hal yang hampir sama disampaikan oleh perwakilan gerakan perempuan Indonesia bahwa Apakah target-target di dalam SDGs sudah merefleksikan agenda CEDAW, ICPD dan BPFA? Salah satu issu penting yang menjadi pertimbangan mereka adalah: Hilangnya Sexual Reproductive Health and

Millennium Development Goals (MDGs) will end in 2015. The government and global society currently is setting a new development agenda called Post 2015 Development Agenda or Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs is one of the results of United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) or usually known as the Rio+20. In the conference, the country members agreed to create plan for sustainable development. Different from Millennium Development Goals (MDGs), SDGs is a continuation of MDGs which focuses on three main pillars (social, economy and environmental).

The development of SDGs has been started since February 2013 (OWG1) to February 2014. As a result of the conference, there are 21 issues to be discussed and to become the development agenda after MDGs completed. In July 2014, the Open Working Group (OWG) which was led by a UN member nation formulated a report on the proposal of Sustainable Development Goals. This report contained 17 development agendas and 169 targets.

Out of 17 development agendas, environmental issue still takes bigger portion of SDGs recommendation. Meanwhile, MDGs target related with mother and child health, HIV & AIDS and reproductive health until now is still far from being met. Therefore, lobbying civil society toward the government has become the priority.

Youth observers worried that the development priority for young generation would be abandoned if not explicitly included in SDGs target. Similar thing was also expressed by the representative of Indonesian women movement. Have targets in SDGs already reflected CEDAW, ICPD and BFPA agenda? One of the important issues to be taken to consideration was: the absence of Sexual Reproductive Health and

Rights pada diskusi di High Level Panel SDGs di Bali menjadi pertanyaan semua orang, apakah SDGs benar-benar komitmen untuk menjaga agar No One Left Behind. Jika ya, maka tentu kelompok-kelompok terpinggirkan seperti LGBT, minoritas, perempuan dari berbagai latar belakang, mendapatkan tempat di "tengah" bukan pinggiran.

Dalam rangka mempertahankan SRHR di dalam SDGs, PKBI bergabung dengan lebih dari 100 Member Association di seluruh dunia bersama IPPF melaksanakan kampanye yang disebut Global Day of Action, pada bulan Mei 2014. Tujuan kampanye tersebut adalah untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan di seluruh dunia guna mendukung goal IPPF Vision 2020 manifesto, yaitu: "Pada tahun 2015 membangun sebuah kerangka pembangunan internasional baru yang mencakup kesehatan seksual, reproduksi dan hak-haknya sebagai prioritas penting." Peluncuran Vision 2020 pada April tahun 2013 telah berhasil dengan lebih dari 50 anggota IPPF ambil bagian dan sepakat bahwa satu hari setiap tahun sampai tahun 2020 kami akan mempersatukan pemerhati SRHR seluruh dunia untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan goal Vision 2020.

Dari sisi pemerintah Indonesia, Bappenas memiliki peran cukup besar dalam menterjemahkan goal SDGs menjadi langkah-langkah strategis ke dalam RPJMN, sedangkan Sementara Kemlu, memiliki peran sebagai negosiator dalam forum multilateral yang lainnya seperti G20, ASEAN, Bali Democracy, Goverment Partnership, Asia Africa Conference, MIKTA, D8 dan sebagainya.

Erry H.Kamka –
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PKBI

> PKBI dalam upayanya mempertahankan SRHR di dalam SDGs bergabung dengan member association di seluruh dunia bersama IPPF melaksanakan kampanye untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan di seluruh dunia.

> *In its attempt to keep SRHR in SDGs, together with IPPF, IPPA collaborated with Member Association from around the world to conduct a campaign to influence all policy makers in the world.*

Rights from SDGs High Level Panel discussion in Bali, which made everyone wondering if SDGs was really committed in ensuring that there would be No One Left Behind. If the answer is yes, then marginalized groups such as LGBT, the minority, women from various backgrounds would be able to find their place "among", not "on the edge of" the society.

In order to keep SRHR in SDGs, together with IPPF, IPPA collaborated with more than 100 Member Association from around the world to conduct a campaign called Global Day of Action in May 2014. The objective of the campaign was to influence all policy makers around the world to support IPPF Vision 2020 manifesto goal: "To build a new international development framework in 2015 that includes making sexual health, reproductive and its rights important priorities." The introduction of Vision 2020 in April 2013 was a success. More than 50 IPPF members participated and agreed that every year until 2020 they will allocate one day in each year to gather SRHR observers from all over the world to urge the government to pay attention to Vision 2020 goal.

From Indonesian government side, Bappenas has quite big role in transforming SDGs goal into strategic steps within the National Medium Term Development Plan (RPJMN). Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs has a role of negotiator in other multilateral forums such as G20, ASEAN, Bali Democracy, Government Partnership, Asia Africa Conference, MIKTA, D8 and others.

***Erry H.Kamka** –*
Head of IPPA Planning and Development

MUSYAWARAH NASIONAL XV PKBI (KUPANG, 9-11 OKTOBER 2014)

Peran PKBI dalam menyongsong *Sustainable Development Goals* (SDGs)

IPPA 15th NATIONAL CONFERENCE (KUPANG, 9th - 11th OCTOBER 2014)

The Role of IPPA in Welcoming Sustainable Development Goals (SDGs)

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat tertua yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia sejak 23 Desember 1957. Sejak PKBI menjadi anggota tetap Indonesian Planned Parenthood Federation (IPPF) maka program semakin terfokus dan mengedepankan SRHR sebagai arahan dari setiap programnya.

Sebagai suatu organisasi yang sudah berkembang, PKBI memiliki berbagai instrumen untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan PKBI. Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan satu instrumen penting dalam peningkatan kapasitas organisasi yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali dihadiri oleh utusan Daerah dan Cabang, Pengurus Harian Nasional, Badan Pengawas, Komisi Ahli, Staf Pelaksana (Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Eksekutif, Kepala Divisi/ Unit, dan Direktur Eksekutif Daerah), Youth Representative dan undangan lainnya, sesuai yang diatur dalam AD/ART PKBI.

Musyawarah Nasional (MUNAS) XV Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berlangsung pada 9 – 11 Oktober 2014 di Hotel Aston Kupang- NTT yang dihadiri oleh kurang lebih 350 orang peserta yang berasal dari 27 Provinsi dan undangan lainnya.

Selama proses kegiatan MUNAS XV berlangsung, semua peserta mengikuti kegiatan sidang-sidang, antara lain:

a) PRA MUNAS XV

Kegiatan Pra MUNAS XV PKBI adalah kegiatan pertemuan Nasional Remaja PKBI yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell-in Kupang pada tanggal 8 - 9 Oktober 2014. Forum Remaja ini membahas peran dan partisipasi remaja di PKBI baik dalam kepengurusan maupun dalam pelaksanaan program, serta

The Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) is the oldest non-government organization that pioneered the Family Planning movement on 23 December 1957. Since becoming a permanent member of Indonesian Planned Parenthood Association (IPPF), IPPAs' programs are more focus and places Sexual and Reproductive Rights as the guideline of its programs.

As a developing organization, IPPA has a variety of instruments to preserve, maintain and develop the organization. The National Conference (MUNAS) is one of important instruments in improving the organization's capacity. As a quadrennial event, the conference is usually attended by representatives from Chapters and Branches, National Board, Board of Supervisors, Commission of Experts, Executive Staff (Executive Director, Vice Executive Director, Division/Unit Head and Regional Executive Director), Youth Representatives and other invitees as regulated in IPPA's articles of association.

IPPA 15th National Conference was held from 9 to 11 October 2014 in Aston Kupang Hotel, East Nusa Tenggara and was attended by around 350 participants from 27 provinces and other invitees.

During the conference, all participants attended the following sessions:

a) PRE 15th NATIONAL CONFERENCE

The Pre 15th National Conference that was held at Swiss Bell Hotel in Kupang from 8 to 9 October 2014 was a national gathering event for IPPA youth. In addition to discussing the role and participation of IPPA's youth within the organization management and program implementation, the forum also

pemilihan Youth Representative PKBI dan Youth Alternate tingkat Nasional sebagai pengurus Forum Remaja PKBI.

Adapun rekomendasi kebijakan organisasi terkait remaja adalah:

1. Adanya rumusan definisi remaja yang bukan sekedar batasan usia dan memberi nuansa yang lebih positif dalam definisi tersebut. Anggota remaja PKBI dengan batasan usia 12 – 24 tahun.
2. Minimal 30% keterwakilan remaja dalam kepengurusan PKBI di semua tingkatan organisasi dan alokasi minimal 30% anggaran PKBI untuk pengembangan remaja di semua tingkatan organisasi PKBI. Remaja yang kami maksud bukan hanya remaja mainstream tapi juga mempertimbangkan remaja yang Lesbian, Gay, Biseks, Transgender, Interseks, Queer (LGBTIQ) , difabel, tanpa memandang ras, suku, agama. Remaja merupakan masa depan organisasi ini.
3. Menjadikan Youth Center sebagai tempat belajar bagi remaja dan wadah gerakan remaja PKBI, dan menjadikannya sebagai salah satu komponen penilaian akreditasi. Adapun basis Youth center berada di tingkat cabang : kota/ kabupaten.
4. Membangun Youth Forum sebagai basis aliansi strategis remaja PKBI.

elected IPPA National Youth Representative and Youth Alternate.

Below are the organization's policy recommendations related to youth:

1. *To have a clear definition on youth that is not defined only by age group and with more positive connotation. IPPA youth members are those belong to age group of 12 to 24 years-old.*
2. *To have a minimum of 30% youth representative in all levels of IPPA organization and a minimum of 30% IPPA fund to be allocated for youth development in all levels of IPPA organization. Youth in IPPA are not limited only to general young people but also include Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer (LGBTIQ), young people with disabilities regardless of race, ethnicity and religions. Youth is the future of the organization.*
3. *To make the Youth Center as a learning center for young people and a place to facilitate IPPA youth movement. Moreover, it is also recommended to include the Youth Center into one of assessment components for accreditation. The Youth Center to be located at branch level: city/regency.*
4. *To make Youth Forum the base of IPPA's youth strategic alliance.*

5. Keterwakilan bermakna remaja dalam perkumpulan di setiap tingkatan, termasuk posisi strategis remaja dalam kepengurusan seperti pada posisi wakil ketua, wakil sekretaris maupun wakil bendahara.

b) SIDANG ILMIAH

Sidang Ilmiah dalam acara Musyawarah Nasional XV ini dilaksanakan Seminar dengan Tema "Peran PKBI dalam Menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs)" dengan moderator Dr. Roy Tjiong yang menampilkan 3 (tiga) orang pembicara yaitu :

1. dr. Stefanus Bria (KEPALA DINKES PROPINSI NTT) dengan sub tema "Penurunan AKI DAN AKB DI NTT melalui Pemberdayaan Remaja".
2. Mukhotib, MD (Sekretaris PHD PKBI DIY) dengan sub tema bahasan "REMAJA: SDGs DAN PKBI".
3. Bahaluddin Surya (KETUA YOUTH FORUM PKBI) membahas tentang "Gerakan Sosial Remaja PKBI".

Dan pembicara yang mewakili dari Menkes adalah Bapak dr. Anung Sugihantono (DIRJEN BINA GIZI DAN KIA, KEMENKES RI) dengan mengangkat sub tema bahasan "Sosialisasi Peraturan Pemerintah NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.

c) SIDANG MUNAS XV

Ada dua (2) macam sidang Munas (Sidang Organisasi) yaitu :

1. **Sidang Pleno**
   Terdiri dari : acara pembukaan, sidang Kuorum, sidang Tata Tertib, pemilihan Pimpinan (ketua) Munas XV, Pertanggung Jawaban Pengurus periode 2010-2014, Pemaparan konsep amandemen AD/ART, Pokok-Pokok Kebijakan,

5. To have youth representative in every level of association and to have youth involvement in strategic positions within the board such as vice chairman, deputy secretary and deputy treasurer.

b) SCIENTIFIC SESSION

A seminar in Scientific Session in IPPA 15th National Conference carried the theme of "IPPA Role in Welcoming Sustainable Goals (SDGs)". The seminar presented Dr. Roy Tjion as the event moderator and three speakers with sub-themes as follow:

1. *dr. Stefanus Bria (Head of Public Health Office for East Nusa Tenggara Province) with sub-theme "Reducing IMR and MMR in East Nusa Tenggara through Youth Empowerment.*
2. *Mukhotib, MD (Secretary of Chapter Governing Body in IPPA Yogyakarta) with sub-theme "YOUTH: SDGs AND IPPA".*
3. *Bahaluddin Surya (Head of IPPA Youth Forum) with sub-theme "IPPA Youth Social Movement".*

Also participated in the hearing was a representative from the Ministry of Health dr. Anung Sugihantono (Directorate General for Nutrition and Mother and Child Health) with sub theme "the SOCIALIZATION of GOVERNMENT REGULATION NUMBER 61/2014 on REPRODUCTIVE HEALTH".

c) 15 NATIONAL CONFERENCE SESSION

There were two (2) types of National Conference sessions (Organization Session):

1. ***Plenary Session***
   Consisted of: opening, Quorum session, Disciplinary Session, election of the head of the 15th National Conference, Accountability of the Board for the period of 2010-2014, Presentation on the amendment of Articles of Association, Principles of Policy, Description and the Division of the

Penjelasan dan Pembagian Komisi, Pengesahan Hasil Sidang-Sidang Komisi , Pemilihan Ketua PKBI, Penetapan Pengurus Nasional, Penetapan Badan Pengawas dan acara Penutupan.

2. **Sidang Komisi, terdiri dari:**
   a. Komisi A (LPJ dan Rekomendasi) membahas tentang laporan pertanggung jawaban dan rekomendasi.
   b. Komisi B (AD dan ART) membahas tentang usulan perubahan AD-ART PKBI, yang dibahas pasal demi pasal sebagai hasil sidang komisi. Hasil sidang Komisi yang menjadi perdebatan dan tidak mencapai kata sepakat yaitu:
      - Tentang "Orientasi seksual" dalam Bab IV Pasal 4 pada Prinsip ayat (1) tentang Terbuka.....dst,, ada beberapa peserta tidak setuju sehingga tidak tercapai keputusan Sidang Komisi.
      - Argumen untuk memasukkan Anggota Remaja atau tidak, diterima tetapi ada catatan sebagian peserta tidak setuju maka akan diserahkan ke pleno.
   c. Komisi C (Kebijakan Organisasi) membahas usulan Kebijakan PKBI tentang Kelembagaan, Kepengurusan, Sekretariat, Manajemen Program, SDM (Karyawan dan Relawan), Kebijakan Informasi, Manajemen Operasional, Keuangan, Monev dan pelayanan.
   d. Komisi D (Prioritas Renstra 2014 – 2018). Komisi ini membahas tentang capaian Renstra sampai dengan 2014 dan prioritas yang akan dilakukan sampai dengan tahun 2018.
   e. Komisi E (Peran dan Posisi Remaja) komisi ini membahas tentang Peran dan Posisi remaja PKBI dalam struktur PKBI.
   f. Komisi F (Mobilisasi Sumber Dana) Komisi ini membahas tentang peluang dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber dana bagi PKBI.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI DALAM MUNAS XV PKBI

Setelah melaksanakan sidang-sidang KOMISI dan PLENO MUNAS XV PKBI di Kupang telah menghasilkan 17 (tujuh belas) keputusan penting antara lain :

1. Ketetapan tentang Kuorum MUNAS XV PKBI, bahwa Musyawarah Nasional XV PKBI telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan.
2. Ketetapan tentang Jadwal Acara MUNAS XV PKBI tahun

National Conference Commission, Ratification of the Result of Commission Sessions, the Election of IPPA Chairman, the Establishment of IPPA National Board, the Establishment of Supervisory Body and Closing.

2. ***Commission Session consisted of:***
   a. Commission A (Accountability Report and Recommendation) discussed about accountability report and recommendation.
   b. Commission B (Articles of Association) discussed the proposed changes for each article of IPPA Articles of Association which resulted from the commission session. The following are the results of Commission Session which are still a controversy and have not reach agreement.
      - *On "Sexual Orientation" in Chapter IV Article 4 on the principle of paragraph (1) about Open... and so on. There were several participants who disagreed with the statement thus there was no consensus reached in the Commission Session.*
      - *Some participants argued whether Youth should be included in the Articles of Association since there was still no consensus, participants agreed to forward the issue to Plenary Session.*
   c. Commission C (Organization Policy) discussed the proposed IPPA policy on Organization, Board, Secretariat, Program Management, Human Resources (Staff and Volunteers), Information Policy, Operational Management, Finance, Monev and Services.
   d. Commission D (Strategic Plan Priority 2014 – 2018). This commission discussed the achievement of the Strategic Plan as of 2014 and the organization's priority to 2018.
   e. Commission E (Youth Role and Position).This commission discussed the role and position of IPPA youth within the organization structure.
   f. Commission F (Mobilization of Funding Resources). This commission discussed the opportunities and policies related with the development of funding resource for IPPA.

THE RESULT OF IPPA 15th NATIONAL CONFERENCE

Completing Commission and Plenary Sessions, IPPA 15th NATIONAL Conference in Kupang established 17 (seventeen) important decisions such as:

1. *Establishment on the Quorum of IPPA 15th National Conference: IPPA 15th National Conference has fulfilled the required quorum for decision making.*

Sebagai suatu organisasi yang sudah berkembang, PKBI memiliki berbagai instrumen untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan PKBI. Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan satu instrumen penting dalam peningkatan kapasitas organisasi yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali.

2014.

3. Ketetapan tentang kebijakan PKBI.
4. Ketetapan tentang Pimpinan MUNAS XV PKBI tahun 2014 yang menetapkan Dra. Hj. Nurul Herliany, Apt, MS, DR.Ir. Hj. Apiaty Aminsyahm, MSi, Arif Noor Hartanto, SIP, Ir. Badrunissa, MSi, DR. Susilo Handoyo, Sh, M.Hum sebagai pimpinan MUNAS XV PKBI.
5. Ketetapan tentang Pengangkatan Anggota Kehormatan PKBI yang menetapkan GUSTI KANJENG RATU HEMAS sebagai Anggota Kehormatan PKBI.
6. Ketetapan tentang Pengesahan Pertanggungjawaban Kerja dan Pembebasan Tugas Pengurus Nasional Masa Bakti 2010–2014, yang menetapkan menerima dan mengesahkan laporan Pertanggungjawaban Pengurus Nasional PKBI masa bakti 2010-2014.
7. Ketetapan tentang Rekomendasi atas Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Nasional Masa Bakti 2010 – 2014 dan rekomendasi ini sebagai bahan untuk penyusunan prioritas program kerja bagi Kepengurusan masa bakti 2014 – 2018.
8. Ketetapan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dan menyatakan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2010 tidak berlaku lagi.
9. Ketetapan tentang Pokok-Pokok Kebijakan PKBI 2014 – 2018 tentang organisasi, program dan keuangan.
10. Ketetapan tentang Prioritas Rencana Strategis PKBI 2014–2018.
11. Ketetapan tentang Peran dan Posisi Remaja di PKBI.
12. Ketetapan tentang Mobilisasi Sumber Dana PKBI.
13. Ketetapan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Nasional PKBI.
14. Ketetapan tentang Ketua Pengurus Nasional PKBI Masa Bakti 2014 – 2018 yang menetapkan DR. SARSANTO WIBISONO SARWANO, SpOG, sebagai Ketua Pengurus Nasional PKBI masa bakti 2014 – 2018.

2. Establishment on the Rundown of IPPA 15th National Conference, 2014.
3. Establishment of IPPA policy.
4. Establishment on the appointment of Dra. Hj. Nurul Herliany, Apt, MS, DR.IR. Hj. Apiaty Aminsyahm, Msi, Arif Noor Hartanto SIP, Ir. Badrunissa, Msi, DR. Susilo Handoyo, Sh, M. Hum as Chairmen of IPPA 15th National Conference.
5. Establishment of appointed GUSTI KANJENG RATU HEMAS as IPPA Honorary Member.
6. Establishment on the Ratification of Accountability and the Dismissal of IPPA National Board for the period of service of 2010-2014, and the acceptance of IPPA National Board's accountability report for the period of service 2010-2014.
7. Establishment on the Recommendation of Evaluation for the Accountability Report of IPPA National Board with 2010-2014 working period.
8. Establishment on the Articles of Association that stated the invalidation of 2010 Articles of Association.
9. Establishment of IPPA Policy principles (for the period of 2014-2018) on organization, programs and finance.
10. Establishment of IPPA Strategic Planning Priority for the period of 2014-2018.
11. Establishment on the Role and Position of Youth in IPPA.
12. Establishment on IPPA Funding Mobilization.
13. Establishment on the Procedure of the Election of IPPA National Board Chairman.
14. Establishment on the newly assigned DR. SARSANTO WIBISONO SARWANO, SpOG, as the Chairman of IPPA National Board for the service period of 2014-2018.

As a developing organization, IPPA has a variety of instruments to preserve, maintain and develop the organization. The National Conference (MUNAS) is one of important instruments in improving the organization's capacity

15. Ketetapan tentang Formatur untuk membentuk Pengurus Nasional Masa Bakti 2014 – 2018.
16. Ketetapan tentang Tatacara Pemilihan Badan Pengawas Nasional.
17. Ketetapan tentang Badan Pengawas Nasional Masa Bakti 2014 – 2018, yang menetapkan Ketua : Prof. DR. Prijono Tjiptoherijanto, SE dan Wakil Ketua: Drs. Rizal Malik, MA, dan memberikan wewenang kepada Badan Pengawas terpilih untuk menentukan anggota Badan Pengawas Nasional PKBI.

Oleh Haryati
(Pengembangan Kelembagaan dan Kerelawanan)

15. Establishment on a formation to determine National Board for the service period 2014-2018.
16. Establishment on the Election Procedure for the National Supervisory Board.
17. Establishment on the newly appointed Chairman of the National Supervisory Board 2014-2018 Prof. DR. Prijono Tjiptoherijanto, SE and Vice Chairman Drs. Rizal Malik, MA and to give authorization for the elected Supervisory Board to select the members of the board.

Written by Haryati
(Institutional Development and Volunteerism)

MUNAS XV PKBI

Cerita dari TIMOR

IPPA MUNAS XV

Story from TIMOR

Dalam kurun waktu empat tahun sekali, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)- sebuah LSM yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas). Provinsi NTT yang selalu dikenal dengan nada minor dalam berbagai aspek, coba menawarkan diri agar PKBI keluar dari belenggu pemikiran bahwa hanya di Pulau Jawa yang bisa menyelenggarakan Munas. Karena itu, pada rapat pengurus nasional 2013, PKBI NTT menawarkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Munas XV Tahun 2014. Tawaran ini akhirnya disetujui dengan menetapkan NTT sebagai tuan rumah Munas yang diselenggarakan pada 9- 12 Oktober 2014 di Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepercayaan yang diberikan ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri karena NTT merupakan provinsi pertama yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Munas diluar Pulau Jawa. Namun di sisi lain, kepercayaan ini sekaligus sebagai beban dan tantangan tersendiri mengingat NTT selalu diidentikkan dengan berbagai nada minor sebagai provinsi miskin, terbelakang, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Bahkan NTT sendiri pun bukan lagi Nusa Tenggara Timur tapi diplesetkan dengan sejumlah nada fals seperti Nanti Tuhan Tolong, dan Nasib Tidak Tentu.

In a period of four years, Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) – an NGO that pioneered Family Planning movement in Indonesia conducts a National Conference (Munas). East Nusa Tenggara province (NTT) that has been known for its lackness in various sectors, tried to change the perspective that Munas could only be held in Java Island. Therefore, during IPPA National Board meeting 2013, IPPA NTT offered to host Munas XV 2014. The board members agreed to have Kupang, the capital city of NTT, as the venue for Munas on 9-12 October 2014.

The trust given was a great pleasure to IPPA NTT for NTT was the first appointed province outside Java Island that would host Munas. However, the trust also came with its own burden and challenge as NTT has always been identified with various lackness such as poverty, under development and the high mortality rate of mothers and newborns. People often make fun of NTT abbreviation, turning it into ridiculous words such as Nanti Tuhan Tolong (God will Help Later) and Nasib Tidak Tentu (Uncertain Fate).

Untuk menyukseskan penyelenggaraan forum tertinggi PKBI itu, tentunya dibutuhkan dukungan sumber daya yang cukup besar, baik aspek anggaran maupun sumber daya manusia (SDM). Langkah strategis yang diambil adalah beraudiens dengan Gubernur Provinsi NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wali Kota Kupang, Jonas Salean, SH, Msi. Selain itu melakukan pendekatan dengan DPRD Provinsi NTT agar bisa memberi persetujuan pengalokasian anggaran dari APBD. Juga dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, dan Biro Keuangan Setda NTT.

Tidak hanya itu, perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, PT Flobamor dan Bank milik Pemerintah NTT, Bank NTT pun tidak luput dari pendekatan. Bahkan PKK dan Dekranasda Provinsi NTT pun turut berpartisipasi dalam persiapan penyelenggaraan Munas XV PKBI. Intinya, berbagai audiens dan pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk menyukseskan Munas XV.

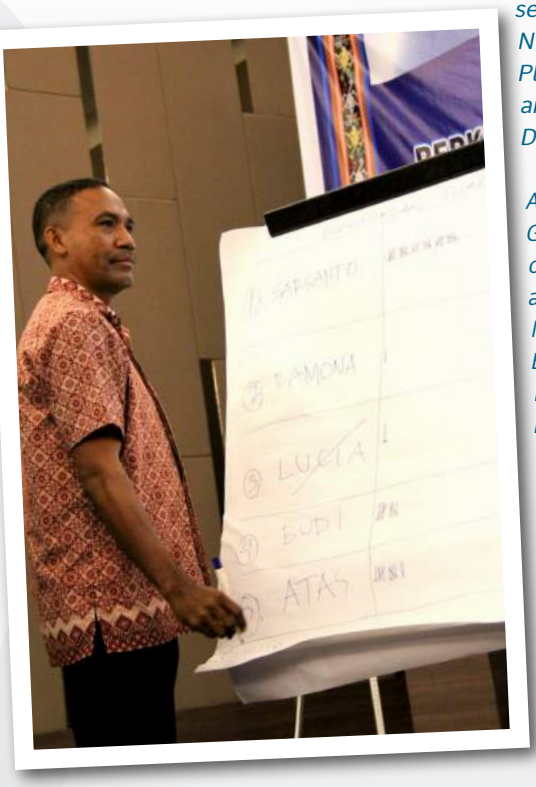

Menariknya, dalam struktur panitia daerah Munas XV, ada unsur pemerintah. Ini merupakan satu hal positif bagi PKBI dalam membangun kemitraan dengan pemerintah di tingkat daerah. Membangun kemitraan dengan pemerintah, bukanlah tidak punya alasan. Ini tentunya dilandasi sebuah pemikiran bahwa selama ini PKBI dalam berbagai program kerjanya, selalu mendukung program pemerintah, terutama di bidang kesehatan. Apalagi PKBI juga punya komitmen yang sama dengan pemerintah dalam mewujudkan MDGs.Dukungan dari berbagai pihak membuahkan hasil positif. Dimana, penyelenggaraan Munas berjalan lancar dan berhasil memilih Ketua Pengurus Nasional PKBI dan menghasilkan sejumlah keputusan untuk perjalanan PKBI empat tahun ke depan. "BAE SONDA BAE, TANA TIMOR LEBIH BAE"

Markus Alibrandi
- Direktur Eksekutif Daerah PKBI Nusa Tenggara Timor

In order to successfully hold the highest forum event, IPPA certainly needed a quite big resources both in the form of fund and human resources. As a strategic measure for the success of Munas XV, IPPA held a meeting with the Governor of NTT, Drs. Frans Lebu Raya and the Mayor of Kupang, Jones Selan, SH, Msi. In addition, IPPA also approached NTT Local/ Provincial House of Representative (DPRD) to approve the budget alocation from the Provincial Local Budget (APBD). Moreover, IPPA also approached several institutions such as NTT Regional Development Planning Agency (Bappeda) and NTT Financial Bureu District Secretariat.

As for NTT Provincial Government (Pemprov) owned companies sector, IPPA approached PT Flobamor and NTT government-owned bank, Bank NTT. Also participated in the preparation of IPPA Munas XV were Family Welfare Movement (PKK) and NTT Provincial Council for Traditional Handicrafts (Dekranasda Provinsi NTT). Basically, IPPA approached various audience for the success of Munas XV.

Interestingly, there was a government element within Munas XV committee structure. This became an added value fo IPPA partnership with regional government. IPPA partnership with regional government is not without reason as all this time IPPA has always been supporting government programs especially in health field. In addition, both IPPA and the government are committed to meet MDGs target. The supports from various stakeholders produced a positive result. Munas went smoothly and not only the chairman of the National Board was elected in the Munas but several policies for the next four years were also established. "BAE SONDA BAE, TANA TIMOR LEBIH BAE"

Markus Alibrandi
- Executive Director of East Nusa Tenggara Chapter

REFLEKSI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2014

Lawan Kekerasan Seksual di Sekolah

REFLECTION ON THE NATIONAL EDUCATION DAY 2014

Fight Sexual Violence at Schools

Jakarta, 13 Mei 2014 - Jaringan Remaja Nasional melakukan aksi jalan mundur 3 KM menuju Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

REMAJA INDONESIA

Berdasarkan Sensus Penduduk dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah remaja usia 10-24 tahun sekitar 64 juta atau 27,6 persen dari jumlah penduduk sebanyak 237.6 juta jiwa. Melihat hal tersebut, kita dapat yakini bahwa jumlah proporsi remaja ialah jumlah tertinggi.

Akibat tidak diberikannya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual secara komprehensif menyebabkan meningkatnya risiko reproduksi dan seksual remaja di Indonesia. Risiko reproduksi tersebut meliputi Kehamilan Tidak diinginkan (KTD), Anemia, dan unsafe abortion, sementara risiko seksual meliputi : Kekerasan Seksual, IMS, kanker mulut rahim dan HIV&AIDS.

SAATNYA BERIKAN PERLINDUNGAN BAGI REMAJA DARI KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan (seksual) pada anak dan remaja selalu meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus. Dari jumlah itu, 1.424 adalah kasus kekerasan, termasuk 730 kekerasan seksual. Data ini meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 1.381 pengaduan dalam kurun waktu yang sama.

Pada tahun 2014 terdapat 427 kasus terhitung mulai bulan Januari hingga April, dan ternyata dari jumlah kasus diatas 70 persen kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan rumah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di salah satu sekolah pendidikan usia dini Daerah Ibu Kota DKI Jakarta.

Fakta tersebut merupakan bukti bahwa sekolah

Jakarta, May 13th, 2014 *– National Youth Network marched backwards as far as 3 KM toward the Ministry of Education and Culture.*

INDONESIAN YOUTH

Based on Population Census by the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2010, the number of youth aged 10-24 years was around 64 million or 27.6% of the total 237.6 million populations. The number showed that youth dominates the country's total population.

Due to the absence of comprehensive education on reproductive and sexual health, youth in Indonesia faces higher risk of unsafe reproductive and sexual behaviors. The reproduction risks include Unwanted Pregnancy, Anemia and unsafe abortion, while sexual risks include sexual violence, STIs, Cervical cancer and HIV&AIDS.

IT'S TIME TO PROTECT YOUTH FROM SEXUAL VIOLENCE

Sexual violence on children and teenagers continue to increase annually. The National Commission for Child Protection recorded 2,792 cases from January to October 2013 where 1,424 of them were violence

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kami menuntut:

1. Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan reproduksi bagi anak dengan Pendidikan Kesehatann Reproduksi Komprehensif melalui Institusi Pendidikan mulai tingkat PAUD hingga SMU.
2. Membangun Sistem perlindungan anak dari Kekerasan (seksual) di seluruh wilayah pendidikan (Sekolah formal dan non formal).
3. Mengawasi institusi Pendidikan dan menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik dari Kekerasan (seksual).

menjadi tempat yang cukup rawan bagi anak dan remaja. Isu kekerasan seksual yang semakin marak terjadi disetiap daerah membuat kita menjadi resah dan bertanya tanya, sudah sejauh apa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan upaya penanggulangan hal tersebut diatas.

Hal ini dapat disimpulkan sebagai kemunduran dari dunia pendidikan Indonesia, dalam satu tahun terakhir ini kementrian telah meluncurkan kurikulum baru yang seharusnya dapat memberikan hasil yang baik bagi para siswa. Ini seharusnya menjadi perhatian yang besar bagi Kementrian Pendidikan untuk dapat merumuskan kembali apa tindakan yang harus dilakukan. Pemberian pendidikan yang komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi menjadi jawaban yang paling tepat untuk dilakukan di sekolah.

Melihat hal itu, kami remaja yang mengatasnamakan Jaringan Remaja Nasional terdiri dari remaja seluruh Indonesia merasa sangat prihatin dengan korban dan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Maka pada hari Selasa 13 Mei 2014 pukul 10.00 pagi, kami mengadakan kegiatan aksi bersama yang dilakukan didepan kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Oleh : Bahaludin Surya -
Wakil Ketua V Pengurus Nasional

cases, including 730 sexual violence cases. Compared to the previous year that recorded 1,381 reports during the same period of time, cases in 2013 were increasing.

In 2014, there were 427 violence cases reported from January to April and 70% of them occurred at schools and homes. One of the cases occurred in one of the early childhood education schools in Jakarta

These facts prove that schools are not safe enough for children and teenagerrs. The news of sexual violence that is increasingly spreading in every region making people anxious and uncertain and wonders what have the Ministry of Education and Culture done to prevent such case.

This indicates a setback in Indonesia's education system. In the past year, the ministry has introduced new curriculum that should have been able to provide better results to students. This should be a major consideration for the ministry to reform their strategy. A comprehensive education on sexual and reproductive health at schools should be the best solution to solve the problem.

In regards to that matter, we, on behalf of the National Youth Network that consists of young people from all over Indonesia, are deeply concern to the victims and to the increasing number of sexual violence. Therefore, on Tuesday 13 May 2014, on 10.00 A.M, we gathered in front of the Ministry of Education and Culture office.

Written by : Bahaludin Surya
- Vice Chairman V National Board

We demand the Ministry of Education and Culture to:

1. *Fulfill the Sexual and Reproductive Health Rights for children by integrating Comprehensive Education on Reproductive Health into education institutions starting from the Early Childhood Education level (PAUD).*
2. *Build child protection system to protect children from (sexual) violence at all education areas (formal and non formal schools).*
3. *Monitor education institution and to ensure the safety and comfort of all students from (sexual) violence.*

Siapkan Sustainability, IPPF Kembangkan Social Enterprises

Preparing Sustainability, IPPF Develops Social Enterprise

Perjalanan panjang IPPF ternyata mengalami banyak tantangan termasuk dalam pendanaan. Situasi sudah berubah. Dulu IPPF mempunyai dana unrestricted yang banyak untuk membantu anggotanya namun sekarang dana yang dimiliki semakin turun dan menjadi sangat sedikit. Donor pun saat ini cenderung memberikan dana yang bersifat restricted dengan peruntukan tertentu, di daerah tertentu, serta pendekatannya berbasis proyek yang keberlangsungannya belum tentu terjamin. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas terus meningkat. Menghadapi situasi tersebut, IPPF mendorong semua anggotanya untuk melakukan penggalangan dana, salah satunya melalui Social Enterprise, sebuah upaya penggalangan dana berbasis bisnis yang memberikan keuntungan finansial dan keuntungan sosial.

Sebagai langkah awal, maka IPPF menyelenggarakan Social Enterprise Meeting "Experience for a Vision" di Bermonsey Hotel, London pada tanggal 5-6 Juni 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 26 peserta dari 12 negara anggota IPPF dan perwakilan seluruh IPPF regional office. Dari Indonesia, terdapat dua perwakilan PKBI yang menghadiri kegiatan tersebut yaitu Chatarina Wahyurini, Kepala Bidang Kelembagaan PKBI Pusat dan Elisabet S.A Widyastuti, Direktur Eksekutif PKBI Jawa Tengah.

Melalui pertemuan selama dua hari tersebut, IPPF bermaksud mendapatkan masukan dari pengalaman masing-masing negara dalam melaksanakan social enterprise. Sharing pengalaman tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi penyusunan IPPF Social Enterprises Strategic Framework 2016-2023. Sehingga kedepannya, IPPF dan semua anggotanya mempunyai panduan tentang model social enterprises seperti apakah yang dapat dikembangkan baik di tingkat global, multinasional maupun nasional.

Apa yang dimaksud Social Enterprise?

Berbisnis adalah salah satu peluang yang dilirik oleh IPPF

IPPF long journey apparently faced many challenges including on its funding. IPPF used to have unrestricted fund to support its members but now the funding has become very limited. Today, donors tend to provide funds that are restricted to certain allocations and areas and prefer project-based approach in which its sustainability is not necessarily guaranteed. On the other hand, the need of qualified services among the society continues to increase. To deal with the problem, IPPF encourages all members to conduct fundraising through, among others, Social Enterprise. Social Enterprise is a business-based fundraising that offers financial and social benefits.

As a first step, IPPA held Social Enterprise Meeting "Experience for a Vision" in Bermonsey Hotel, London on June 5-6, 2014. There were 26 participants from 12 IPPF country members and representatives from all IPPF regional offices. Chatarina Wahyurini, IPPA HQ's Head of Institutional and Elisabet S.A Widyastuti, IPPA Central Java Executive Director represented Indonesia and participated in the meeting.

Through the two-day meeting, IPPA intended to get input from each country's experience in implementing social enterprise. The shared experience would be used as a reference to prepare IPPF Social Enterprises Strategic Framework 2016-2023. Thus in the future IPPF and all its members would have guidance on the model of social enterprise that could be developed not only at a global level, but also multi national and national level.

What is Social Enterprise?

Going into business is one of the opportunities eyed by IPPA to deal with the challenges it faced. However, what kind of business that is in accordance with our vision and mission? IPPF chooses the term

untuk menanggapi tantangan yang dihadapi. Namun bisnis yang seperti apa yang sesuai dengan visi dan misi kita? IPPF memilih istilah social enterprise, yaitu sebuah bisnis yang dapat memberikan keuntungan baik secara finansial maupun keuntungan sosial. Bahwa usaha yang dilakukan harus lebih efisien dibanding dengan yang dikerjakan pemerintah, harus lebih sustain dibanding kegiatan non profit dan harus lebih fokus pada persoalan sosial dibandingkan dengan bisnis murni.

Meski terdapat berbagai macam pengertian namun paling tidak social enterprise ini dapat didefinisikan kedalam tiga hal. Pertama, common good is primary purpose. Bahwa usaha yang dilakukan juga harus sejalan dengan agenda sosial kemanusiaan dan keadilan. Kedua, directly address social need. Dalam hal ini bahwa usaha yang dilakukan secara langsung untuk pemenuhan kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. IPPF dan anggotanya sudah mempunyai banyak pengalaman mengenai hal ini, misalnya memberikan layanan klinik yang berkualitas dan komprehensif, menjual produk-produk seksualitas yang bermutu tinggi dan dilengkapi dengan layanan konseling sehingga klien merasa puas. Terakhir, commercial activity drives revenue, usaha apa pun yang dapat menghasilkan keuntungan, yang kemudian keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Wisma PKBI adalah salah satu contoh yang tepat untuk menggambarkan kategori terakhir.

social enterprise. Social enterprise is a business that offers both financial and social benefits. In social enterprise, the work must be more efficient compared to the one done by government, more sustainable compared to the one of non-profit and should focus more on social issues compared to pure business.

Although there are several definitions, social enterprise can at least be defined by three criteria. First, common good is primary purpose, which means the business must in line with humanity and fairness agenda. Second, directly address social need, meaning the business directly done for the fulfillment of reproductive health, and rights on reproductive and sexual health. IPPF and its members already have sufficient experience on the issue, for instance by providing comprehensive and qualified sexual and reproductive health-related services, and selling quality contraceptive products that are equipped with counseling services to guarantee client satisfaction. Third, commercial activity drives revenue. This means the profits gained from any business will be used to fund social activities. Wisma PKBI is one example that best describes the last category.

In social enterprise, the business can be in the form of retail, services or consultant.

Dalam social enterprise, usaha yang dilakukan dapat berupa retail, jasa maupun konsultan.

Keuntungan yang didapat dari penjualan produk atau jasa akan digunakan untuk membantu kaum yang tidak mampu. Sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari program ini.

Bagaimana dengan PKBI?

PKBI Pusat yang berlokasi di Jl. Hang Jebat III/F3 Jakarta sejak tahun 1980-an mempunyai pusat pelatihan KB dan kesehatan reproduksi. Peserta pelatihan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, muncul kebutuhan akan akomodasi yang memadai. Maka di lokasi yang sama, PKBI membangun tempat pelatihan lengkap dengan penginapan dan kantin yang disebut Wisma PKBI. Wisma ini dikelola secara profesional dan tidak hanya melayani kebutuhan internal PKBI tetapi juga melayani tamu umum. Dari hasil usaha ini, PKBI memperoleh keuntungan karena program pelatihan dapat terlayani dengan baik dan berkualitas. Di samping itu, PKBI juga memperoleh keuntungan dari penjualan jasa wisma. Keuntungan yang diperoleh tentunya juga dimanfaatkan untuk mendukung perkumpulan. Keberhasilan pengembangan wisma di PKBI Pusat, akhirnya diikuti oleh PKBI Jawa Tengah dan Jawa Barat yang juga mengembangkan usaha penginapan.

> Dari hasil usaha ini (*social enterprise*), PKBI memperoleh keuntungan karena program pelatihan dapat terlayani dengan baik dan berkualitas.

Selain wisma, di 12 daerah juga sudah mempunyai klinik yang berkualitas dan komprehensif, serta mampu memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat termasuk golongan poor, marginalized, social excluded and underseved (PMSEU).

Kedepan PKBI perlu menggali potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan, mengingat PKBI mempunyai banyak pengalaman dalam pengelolaan program serta mempunyai daerah dan cabang di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa untuk dapat menerapkan social enterprise, baik IPPF maupun PKBI perlu mengubah sikap dari yang sebelumnya sangat charity menjadi usaha yang menawarkan barang, jasa dan layanan yang berkualitas tinggi sehingga siapa pun tidak akan keberatan untuk membayarnya.

Oleh: Chatarina Wahyurini - Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM & Elisabeth W.A - Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah

The profit gained from selling products or services will be used to support the poor, marginalized, social excluded and underseved (PMSEU) and to enable them to enjoy the high quality benefits of this program.

How about IPPA?

IPPA HQ, located in Jalan Hang Jebat III/F3 Jakarta, has a training center for Family Planning and reproductive health since 1980s. The participants come from various regions in Indonesia. This led to the increasing need for proper accommodation. Therefore, in the same location IPPA built Wisma PKBI, a training center completed with a guesthouse and a cafeteria. The guesthouse is managed professionally and does not only provide services for IPPA's internal needs but also services for public. The guesthouse is beneficial for the organization because all training programs can be well facilitated and well served. In addition, the profit gained from opening the guesthouse for public is used to support the organization. Following the success of IPPA Pusat in developing a guesthouse, IPPA Central Java and IPPA West Java are now developing guesthouses to support their activities.

> *The guesthouse is beneficial for the organization because all training programs can be well facilitated and well served.*

Besides a guesthouse, IPPA also has quality and comprehensive clinics in 12 regions. These clinics provide services to all level of community including the poor, marginalized, social excluded and underserved (PMSEU).

In the future, IPPA needs to explore other potentials that can be developed as it has many experiences in program management and has branches throughout Indonesia. And more importantly, to be able to implement social enterprise, both IPPF and IPPA need to change the nature of their work from charity-based to enterprise-based that offers quality goods and services that are worth the money.

Written by: Chatarina Wahyurini - Head of Institutional Development and Human Resources & Elisabeth W.A - Executive Director of Central Java Chapter

Program Peduli Inklusi Sosial Pada Kelompok Waria dan Anak Rentan

Care Program for Social Inclusion towards Transgender and Vulnerable Children

Short description

Mewujudkan inklusi sosial untuk kelompok masyarakat yang mengalami stigma & marjinalisasi, di bawah Kementrian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang (dulu bernama NPM Peduli).

Long description

Program Peduli dirancang untuk mendukung inklusi sosial, yaitu upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, mitra Program Peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari apapun perbedaan yang dimiliki.

Peduli adalah program di bawah koordinasi Kemenko PMK dan bermitra dengan 74 organisasi masyarakat sipil di 82 kabupaten/kota yang menjangkau berbagai kelompok rentan, antara lain: anak dan remaja rentan; masyarakat adat dan lokal yang terpencil dan bergantung pada sumber daya alam; komunitas agama dan kepercayaan lokal yang mengalami diskriminasi;

Short description

Care Program aims to create social inclusion under the Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Kemenko PMK), for groups of people who experience stigma and marginalization. This program used to be called NPM Peduli.

Long description

Care Program is designed to support social inclusion, an effort to put individual dignity and independence as the main value to achieve the ideal quality of life. Through social inclusion, Care Program partner strives to ensure that all elements of society receive equal treatments and opportunities as citizen, regardless of their differences.

Care is a program under the coordination of Kemenko PMK and collaborating with 74 civil organizations in 82 districts/cities that reaches out to various vulnerable groups such as: vulnerable children and young people; indigenous and local communities who live in remote areas and rely on natural resources; religious and local beliefs communities who face discrimination; victims

korban pelanggaran HAM; waria; dan difabel. Program Peduli dikelola oleh The Asia Foundation sebagai Managing Partner dari Kemenko PMK, dengan dana dari Pemerintah Australia.

Mission

Mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang setara sebagai warga negara, terlepas dari apapun perbedaan yang dimiliki.

Gambaran umum program Inklusi yang dilaksanakan PKBI

Setidaknya terdapat beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya social exclusion di masyarakat sehingga terjadinya pola penyingkiran terhadap kelompok tertentu, antara lain: (1) kemiskinan dan penghasilan rendah; (2) tidak ada akses untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak; (3) lemahnya atau tidak adanya dukungan sosial dan jaringan sosial; (4) nilai dan budaya dari kawasan dan lingkungan sekitar (neighbourhood); (5) terputus dari layanan publik.

Secara umum, anak dan remaja mengalami terpinggirkan karena status kewargaannya. Ini terlihat dari belum dianggapnya anak dan remaja sebagai yang telah memiliki kematangan psikologis untuk menentukan pilihan Dunia mereka. Dalam beberapa kasus anak jalanan bahkan dikriminalkan karenanya Stigmatisasi tidak hanya hadir dari masyarakat kebanyakan bahkan juga oleh Negara.

Secara khusus, masing-masing kelompok anak/remaja termarginalkan tersebut memiliki kekhasan persoalan yang berbeda dengan kelompok anak/remaja lain.

of human rights violations; transgender; and people with disabilities. The program is managed by The Asia Foundation as the Managing Partner of Kemenko PMK supported with grants from Australian government.

Mission

To ensure that all elements of society receive equal treatments and opportunities as citizens regardless of their differences.

General Description on IPPA Inclusion Program

There are at least several main factors that can trigger social exclusion in the society, thus creating alienation toward certain groups of people, such as: (1) poverty and low income; (2) no access to decent job and income; (3) inadequate or even lack of social support and network; (4) values and culture of the surrounding neighborhood; (5) disconnection from public services.

In general, children and youth experience exclusion because of their citizenships. People tend to view them as someone who is not psychologically mature yet to determine their choices in the world. In some cases, street children even suffer criminalization due to the stigma that does not only trigger by the society but also by the country.

In particular, each group of marginalized children/youth has distinct problems that differ from other children/youth groups. This

Kekhasan ini harus dipetakan ketika kita melakukan intervensi untuk membantu mengatasi keterpinggiran mereka.

Selain itu individu atau kelompok lain yang mengalami keterpinggiran ini adalah waria, dimana waria mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Dialog berbasis agama tentang orientasi seksual dan identitas gender telah meningkat (sama dengan diaolog berbasis agama tentang isusosial lainnya), dan identitas waria semakin dipertanyakan, biasanya atas nama moralitas Islam dan tatanan sosial. Menariknya, perspektif agama cenderung melihat identitas waria sebagai sesuatu yang dilahirkan, berbeda dengan kaum gay dan lesbian yang dianggap memilih "gaya hidup" (lifestyle) homoseksual.

Dalam kehidupan publik, waria tidak mengalami hambatan administratif ketika mencari layanan dan mengurus KTP. Akan tetapi mereka mengalami stigma dan diskriminasi yang keras di sekolah sehingga banyak waria tidak dapat menyelesaikan sekolah. Akses bekerja bagi waria terbatas baik karena tingkat pendidikan yang rendah serta karena sikap diskriminatif oleh pengusaha sektor formal. Dari pengalaman waria melamar, mereka sering tidak memenuhi syarat administratif.

Sebagai LSM yang bergerak dalam program pemberdayaan masyarakat, PKBI semenjak tahun 2010 (MUNAS XIV) berkomitmen untuk menjadikan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa prinsip yang menjadi landasan PKBI melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah : Memfasilitasi suatu proses untuk memungkinkan masya-

distinction needs to be mapped when we interfere to help overcoming their exclusion.

Besides marginalized children/youth, another group that is prone to exclusion is transgender. Transgender often gains negative sentiment from the society. Recently, the number of religious-based discussion on sexual orientation and gender identity has increased (as well as religious-based discussion on other social issues) and on behalf of Islamic morality and social order, transgender's identity has been put in a spotlight. Interestingly, unlike gay and lesbian, people who are considered to have sexual preferences based on homosexual life style, a religious perspective tends to see transgender as something inborn.

In public, transgender don't have administration difficulties when seeking services and applying for ID. However, they still receive harsh stigmatization and experience discrimination at schools, making them unable to complete school properly. Access to jobs becomes limited due to inadequate level of education and discriminative treatments by entrepreneurs in formal sectors. Most transgender people fail to meet the administrative requirements when applying for jobs.

As a non-profit organization focusing on people empowerment program, IPPA since 2010 (14th National Conference) has been committed to implement people empowerment approach. Several principles that are the basis of this approach are: Facilitating process to enable

rakat mendiskusikan situasi, mengidentifikasi, dan memprioritaskan suatu permasalahan berserta alternative solusi, mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berfikir kritis, mengarahkan kemandirian individu atau kelompok, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kerangka Pemikiran

Berbagai program dalam menghilangkan diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu sudah dilakukan sejak jaman orde baru, namun program masih bersifat parsial, maupun sektoral yang dalam kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang melemahkan modal sosial yang terdapat di masyarakat (gotong royong, kepedulian, dan musyawarah). Lemahnya modal sosial akan mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi permasalahan sosial secara bersama.

Kondisi masyarakat yang memiliki sikap masa bodoh, tidak percaya diri, mengandalkan pihak luar, dan bentuk kesadaran masyarakat yang masih "naïf" akan semakin memudarkan nilai-nilai luhur dalam

> PNPM-PEDULI sebagai program yang bertujuan mengembalikan hak-hak kelompok atau individu pada masyarakat secara utuh melalui program Inklusi sosial.

kehidupan bermasyarakat. Nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah nilai untuk saling menghargai antara anggota masyarakat, mendapatkan hak, dan menunaikan kewajiban selama menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu Negara. PNPM-PEDULI sebagai program yang bertujuan mengembalikan hak-hak kelompok atau individu pada masyarakat secara utuh melalui program Inklusi sosial.

Ekslusi sosial pada kelompok sasaran (Waria dan Anak Rentan) telah memberikan dampak yang sangat besar, antara lain :

1. **Akses layanan publik**
   Kelompok sasaran mendapatkan akses untuk

people to discuss a situation, to identify and prioritize a problem along with the alternative solution, to encourage and motivate people to think critically, directing both individual and group independence and to uphold human rights.

Framework

Since the New Order era, the government had been implementing numerous programs for eliminating discrimination on certain groups of people. However, the implementation of these programs is still partial or sectorial, which on the

> *PNPM-PEDULI aims to give back the society the rights of individual and groups through social inclusion program.*

contrary has weakened the existing social values among people (gotong royong or the attitude of mutual cooperation, caring and deliberation). This would trigger shift of behavior among the society, moving them further away from the spirit of independency, togetherness and caring for overcoming social problems.

The attitude of ignorance, lack of self-confidence, dependency on external sources and naivetés will only diminish the noble values of community living such as attitude of appreciation among members of community and the integrity to maintain the balance between rights and obligation as a citizen. PNPM-PEDULI aims to give back the society the rights of individual and groups through social inclusion program.

Social exclusion on targeted groups (transgender people and vulnerable children) has created great impact, among others, on:

1. ***Access to public services***
   The targeted groups have access to meet the basic needs related to health, education, economy, legal protection and demographic administration.

pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan hukum, dan administrasi kependudukan.

2. **Penerimaan sosial**
   Kelompok sasaran sadar akan nilai positif diri sehingga mampu menintegrasikan dengan keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

3. **Kebijakan diskriminatif**
   Kelompok sasaran mampu mengubah dan atau menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif dan berkeadilan sosial.

Strategi

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program ini tergambarkan seperti di bawah ini :

1. Fokus pada tiga aspek utama dalam perubahan dan pengembangan indicator performansi program yaitu aspek:
   - Peningkatan akses layanan publik (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum).
   - Penegakan HAM melalui peningkatan kapasitas kelompok basis, komunitas, dan masyarakat dengan tujuan terdapatnya perubahan pada segi pengetahuan, sikap, dan perilaku.
   - Peningkatan peran pemerintah melalui kebijakan public; content of law (kebikan yang tidak diskriminatif), context of implementation (penerapan kebijakan yang baik), dan culture of law (dampak perubahan pada masyarakat akibat kebijakan yang ada).

2. Promosi sosial inklusi dan meningkatkan kesejahteraan kelompok penerima manfaat:
   - Pembentukan jejaring kerja di tingkat nasional untuk mempromosikan inklusi sosial.
   - Penguatan kapasitas LSM Lokal.
   - Pengembangan riset/ penelitian/ studi tentang ekslusi sosial.
   - Pengembangan kerangka kerja advokasi.
   - Pengembangan sistem dukungan dan manajemen program.
   - Memainkan peran sebagai pelapor kasus pelanggaran HAM di tingkat nasional dan internasional.
   - Pengembangan manajemen pembelajaran (knowledge management) untuk inklusi sosial.

Oleh : Yudi Supriadi –
Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

2. ***Social acceptance***
   The targeted groups are aware about their positive qualities and know how to integrate these qualities into their families, communities and environment.

3. ***Discriminative Policy***
   The targeted groups are able to change and/or create a non-discriminative policy that embodies egalitarianism.

Strategy

The strategy used for the implementation of this program are as follow:

1. *Focusing on three main aspects within the change and the development of program performance indicator, namely:*
   - *Improvement of access to public services (education, health, economy and legal protection)*
   - *Human Rights enforcement through improvement of basic group, community and society capacity to trigger changes in knowledge, attitude and behavior.*
   - *Improvement on government role through public policy; contents of law (non-discriminative policy), context of implementation (proper policy implementation) and culture of law (changes on the society as impact of existing policy)*

2. *Promoting social inclusion and improving welfare of benefitted groups by:*
   - *Creating working network in the national level to promote social inclusion*
   - *Strengthening capacity of local NGO*
   - *Developing research/investigation/study on social exclusion*
   - *Developing framework of advocacy*
   - *Developing support system and program management*
   - *Acting as rapporteur for human rights violation case both in national and international level*
   - *Developing knowledge management for social inclusion*

Written by : Yudi Supriadi
(Community Empowerment)

Bahaya Perkawinan bagi Anak Perempuan

The Downside of Marriage for Young Girls

PKBI sebagai pihak terkait dari Yayasan Kesehatan Perempuan, sekaligus bagian dari Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+) mempersoalkan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan melalui pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Koalisi menilai bahwa UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum pembenaran perkawinan anak, selain itu pada pasal 7 ayat (2) dispensasi umur yang tidak diatur dengan jelas juga menimbulkan mudahnya perkawinan anak terjadi di Indonesia.

Koalisi 18+ yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu, telah memulai proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada April 2014. Pada akhir tahun 2014, para pihak yang terlibat diminta untuk memberikan kesimpulan terhadap jalannya sidang. Pada catatan kesimpulan PKBI menyoroti Empat (4) hal pokok selama masa sidang sebagai berikut :

PERTAMA, Perkawinan Anak mendiskriminasi Anak Perempuan. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan

As one of the stakeholders of Women's Health Foundation, as well as part of Indonesia Coalition to End Child Marriage (Koalisi 18+), IPPA raised an issue on the legal minimum age for marriage, currently stated at 16 years old, for women by filing a judicial review on the Marriage Law Article 7 paragraph (1) and (2) to the Constitutional Court of Republic of Indonesia.

The coalition considered Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law is conflicting with the constitution as it is used to legally justify child marriage. In addition, paragraph (2) of the same article does not clearly elaborate the age dispensation and creates bigger possibility for child marriage in Indonesia.

The Coalition 18+ that consists of various organizations and individuals, started to file Judicial Review at the Constitutional Court in April 2014. At the end of 2014, all stakeholders were asked to give a conclusion on the proceedings. IPPA later found four (4) concerning matters in the conclusion:

***FIRST**, Child Marriage Discriminates Young Girls. The 1945 Constitution (UUD 1945) Article 28 B Paragraph*

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" namun di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Argumen bahwa UU Perkawinan No 1 tahun 1974 mendiskriminasi perempuan dipertegas oleh keterangan beberapa Saksi Ahli, salah satunya Saparina Saldi. Menurutnya, "maka mengizinkan perempuan usia 16 tahun untuk kawin, berarti negara mengizinkan perkawinan anak atau perkawinan di bawah usia dewasa bagi perempuan, dari frase setiap anak, maka seharusnya tidak ada pembedaan jenis kelamin antara

anak laki-laki dan anak perempuan, UU perkawinan membiarkan Anak Perempuan terdiskriminasi untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, misalnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan.

KEDUA, Perkawinan anak membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi. Dalam UUD 1945 pasal 28 ayat yang sama, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berarti setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Kebutuhan ini tentunya berbeda antara anak perempuan dan laki-laki. Anak Perempuan memiliki resiko reproduksi yang lebih rentan dibandingkan dengan Laki-laki, salah satunya karena Perempuan akan mengalami proses kehamilan dan melahirkan yang membahayakan

(2) stated that "Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination." However, Marriage Law No.1 1974 Article 7 Paragraph 1 stated that "Marriage can only be permitted if the man has reached 19 years old and the woman has reached the age of 16 years."

The argument that the Marriage Law No. 1 of 1974 discriminates women, was confirmed by testimonies from several Expert Witnesses, one of them was Saparina Saldi. According to Saparina Saldi, by permitting 16 years-old women to marry means the country permitting child marriage or underage marriage for women. Saparina Saldi also highlighted that the phrase "every child" in the article should have not referred to a specific gender. The Marriage Law allows discrimination towards young girls by denying their rights to receive equal opportunities as boys and rights to grow and to develop, as well as to get protection from all kinds of violence and discrimination, for example related to education.

***SECOND**, child marriage does not only threaten the child's survival, growth and development but also places the child in a violence-and-discrimination prone situation. The Article 28 (same paragraph) of the 1945 Constitution stated that Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination. This means that every child has the right to have access to health services and social security that corresponds with his/her physical, mental, spiritual and social needs.*

The needs between girls and boys are certainly different. Young girls' reproductive system is more vulnerable and prone compared to boys'. For instance, a young girl would have to go through pregnancy and delivering baby at such young age could threaten her

kelangsungan hidupnya. Argumen ini dipertegas oleh kesaksian Ahli Julianto Witjaksono , "seorang wanita apabila terjadi kehamilan pada usia remaja di bawah 19 tahun lebih rentan dibandingkan dengan kelompok di atas 20 sampai 35 tahun. Karena risiko tinggi dengan berbagai macam penyakit yang bisa mengancam pada kematiannya. Kita lihat kematiannya bisa mengancam tiga sampai tujuh kali.

KETIGA, Ketidaksiapan fisik, Psikis, Sosial, Spritual, Intelektual dan Budaya dalam perkawinan anak. PKBI mempercayai bahwa membentuk keluarga melalui sebuah perkawinan adalah hal yang harus dipikirkan secara serius seperti yang tercakup di dalam AD-ART, "Ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan Hak Asasi Manusia". Oleh dasar itu, maka sebaiknya pasangan yang terlibat di dalam perkawinan adalah pasangan yang telah matang dan dewasa, baik spiritual, psikologis, ekonomi, sosial, dan intelektual.

KEEMPAT, Hukum seharusnya menjadi alat rekayasa social. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada prakteknya masih banyak perkawinan terjadi dibawah umur 16 tahun pada anak perempuan yang terjadi karena banyak faktor, namun PKBI meyakini bahwa hukum, sesuai salah satu fungsinya dapat menjadi alat rekayasa sosial. Seperti yang ditegaskan oleh salah satu Hakim MK, "hukum berjalan ke depan dulu, baru nanti budayanya dikonstruksikan di situ. Jadi sesuai dengan

life. This argument was confirmed by the testimony of Expert Witness Julianto Witjaksono , who stated that "women who get pregnant before the age of 19 is more prone to health risks compared to those of 20-35 years. Due to various life threatening health risks, the mortality rate of underage mothers and newborns are three to seven times higher.

***THIRD**, the Unready of the Body, Psychological, Social, Spiritual, Intellectual and Cultural in Child Marriage. IPPA believes that creating a family through marriage is something that should be thought carefully. As written in the Articles of Association, "Participates in creating a responsible family to achieve the common goal of prosperous family that leads to improved Indonesia human resources quality by focusing on physical endurance, social and cultural, mental and spiritual and human rights." Therefore, it is better that the couples involved in marriage were both mature in spiritual, psychological, economical, social and intellectual wise.*

***FOURTH**, Law as a tool of social engineering In reality, undeniably, many marriages involving girls below 16 years old still occur due to various factors. However, IPPA believes in one of the functions of the law, which is as a tool of social engineering. As confirmed by one of the Judge of Constitutional Court, "the law must move forward first, and the culture will be constructed later on. Thus, it will correspond with the function of the law as a tool of*

fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial kalau begitu..... ".

Berhubungan seksual dengan anak di bawah umur 18 tahun adalah tindak pidana dan tidak sesuai dengan norma masyarakat. Seharusnya ini dimaknai sama, baik berhubungan seksual di dalam maupun di luar perkawinan. UU Perkawinan memberikan pembiaran pencabulan anak perempuan di dalam kedok perkawinan. Secara tidak langsung negara melegalisasi praktek phedofilia asalkan berada di dalam ranah perkawinan. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diubah.

Argumen ini kemudian ditegaskan kembali oleh ahli Yuniyanti Chuzaifah, Bahwa persetubuhan dengan anak adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini seharusnya dimaknai sama, apakah persetubuhan tersebut dilakukan dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Sehingga permintaan dispensasi yang diatur pada pasal 7 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya dimaknai tidak untukmelegalkan persetubuhan dengan anak, melainkan harus diletakkan sebagai upaya hukum untuk melindungi anak yang sedang berada dalam kandungan.

Bila negara tetap melegalkan perkawinan anak perempuan, maka negara telah mengabaikan perlindungan terhadap anak perempuan, baik dari akibat langsung dari perkawinan seperti kematian yang terjadi pada saat persalinan di usia anak, kekerasan terhadap anak di dalam kedok perkawinan, serta dari akibat tidak langsung seperti trafficking pada anak perempuan, tercabutnya hak pendidikan dan hak penghidupan yang akhirnya akan berujung pada kemiskinan.

Beberapa budaya yang ada di Indonesia masih mengganggap praktik perkawinan anak sebagai sesuatu hal yang wajar dan saat ini hal tersebut dilegalkan oleh UU Perkawinan. Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sudah sepantasnya untuk dapat berjalan terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh perubahan sosial/budaya.

Oleh : Frenia T.A.D.S Nababan
- Pelaksana Bidang Program Advokasi

social engineering... "

Sexual activity with a child under 18 is a criminal offense and against the social norm. This view should also be applied to sexual activity occurring within and outside marriage. The Law on Marriage has permitted molestation toward young girls that's done behind the mask of marriage. This indirectly means that the country legalizes pedophilia within marriage. Therefore, it is supposed to be changed.

This argument was later reiterated by expert Yuniyanti Chuzaifah, that sexual activity with a child is a crime as regulated in the Law of Child Protection. The Law on Marriage should have had the same view toward sexual activity with a child whether it is marital or non-marital sexual activity. Therefore, any dispensation requested in Article 7 paragraph 2 Marriage Law No. 1 of 1974 would be viewed as a legal attempt to protect the child's pregnancy instead of as a legalization of child molestation.

If the country remains legalizing child marriage, then it has neglected its duty in protecting girls from both the direct and indirect impacts of the marriage. The direct impact of underage marriage are death during labor, domestic abuse and exploitation, while the indirect impacts are human trafficking, deprivation of fundamental rights to education and to have a decent life, which at the end will lead to poverty.

Several traditions in Indonesia still consider child marriage as normal and that is legalized by the Law on Marriage. Therefore, the law function as a tool of social engineering can be appropriately implemented to create social/cultural change.

Written by : Frenia T.A.D.S Nababan
- Implementing Sector Advocacy Program

PKBI KALIMANTAN TIMUR

Memandirikan Cabang Melalui Bina Anaprasa

IPPA EAST KALIMANTAN

Creating Self-Reliant Branch Through Bina Anaprasa

Memiliki cabang aktif dan mandiri merupakan impian setiap insan PKBI baik ditingkat Cabang, Daerah bahkan PKBI Nasional. Namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah mengingat PKBI merupakan Lembaga yang bergerak di bidang sosial sehingga sebagian besar programnya cenderung mengeluarkan biaya besar dan sangat sedikit yang menghasilkan income.

Menyadari kondisi tersebut, PKBI Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan pilihan program utama pada Rumah Sakit Bersalin dan Bina Anaprasa disamping tetap mengembangkan program lainnya seperti Program Remaja, HIV/AIDS, Gender, dan Usaha produktif di Cabang Kabupaten/kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Salah satu pilihan program unggulannya adalah Program Bina Anaprasa (PAUD). Latar belakang berdirinya Program Bina Anaprasa:

- Pendirian sangat murah, mudah dan ditunjang dengan perhatian pemerintah yang sangat tinggi.
- Memiliki tingkat sustainability sangat tinggi,

To have a self-reliant and active branch is the aspiration of every IPPA activist at the Branch, Chapter, even at the National level. However, it is not an easy task as IPPA is a social organization which rarely generates income yet most of its activities requires quite amount of money.

Being aware of this condition, IPPA East Kalimantan (Kaltim) decided to make Maternity Hospital and Bina Anaprasa its key programs while continuing to develop other programs such as Youth Program, HIV/AIDS, Gender and Productive Enterprise at Branches in Samarinda District/City, Balikpapan, Kutai Kertanegara, Paser District, and Penajam Paser Utara (PPU).

As one of the key programs in IPPA Kaltim, Bina Anaprasa (Early Childhood Education / PAUD) is established because:

- *The program is very easy and very affordable to establish. In addition, the government's support for this program is very strong.*
- *The program has a very high level of sustainability*
- *There is abundant support and aid from various sources such as: The National Education Department (DIKNAS) through pilot PAUD, CSR Program, Funding International, Village Fund and even from non governmental elements*
- *The program is very relevant to IPPA Mission especially on the aspect of health, education, self-reliance and family planning*

CONCEPT OF BINA ANAPRASA

Bina Anaprasa is an early childhood education program for 3 – 6 years old children. This program also combines

- Bantuan Program Bina Anaprasa dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti : Diknas melelui program Rintisan PAUD, Program CSR, Funding International, melalui dana Desa, bahkan dari swadaya masyarakat,
- Program tersebut sangat relevan dengan Misi PKBI khususnya pada dimensi Kesehatan, Pendidikan, Kemandirian dan KB.

KONSEP BINA ANAPRASA

Bina Anaprasa merupakan program pendidikan anak usia 3 – 6 tahun yang dipadukan dengan kesehatan dan pembinaan orang tua siswa khususnya bidang Kesehatan, Keluarga Berencana dan Ekonomi keluarga.

KEUNGGULAN BINA ANAPRASA

1. Pembinaan di bidang pendidikan termasuk penanganan anak dan orang tua
2. Pemeriksaan Kesehatan, Gizi, Gigi anak, Resiko cacingan pada siswa/anak dll
3. Membina Orang Tua siswa dalam bidang KB, Kesehatang Lingkungan, Gizi Keluarga, Usaha Produktif dll
4. Memberi Pemahaman Tentang Kesehatan Reproduksi guna mengantisipasi kekerasan Seks Pada anak.

VISI DAN MISI BINA ANAPRASA

1. **VISI** : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Keluarga sejahtera.

2. **MISI**: Memperjuangkan terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berbudi pekerti tinggi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

TUJUAN BINA ANAPRASA

- **Tujuan Umum :**
  Membangun anak Sehat, cerdas, ceria dan berbudi pekerti tinggi, yang bertumpu pada kekuatan keluarga, masyarakat dan potensi lokal.

- **Tujuan Khusus :**
  1. Mendekatkan akses informasi dan pelayanan pendidikan dan kesehatan anak khususnya anak pra sekolah desa.
  2. Meningkatkan kesertaan KB, Kesehatan, Ketrampilan Dan Pendapatan Keluarga.
  3. Memberdayakan peran keluarga dan

> Konsep Bina Anaprasa merupakan program pendidikan anak usia 3 – 6 tahun yang dipadukan dengan kesehatan dan pembinaan orang tua siswa khususnya bidang Kesehatan, Keluarga Berencana dan Ekonomi keluarga.

health guidance and parental coaching especially on family's health, family planning and economy.

ADVANTAGES OFFERED AT BINA ANAPRASA

1. *Education and parenting coach*
2. *Examination on medical, nutritional, child dental, worm risk on students / children, etc*
3. *Parent coach on family planning, environmental health, family nutrition, productive enterprise, etc*
4. *Knowledge sharing on reproductive health to anticipate sexual violence on children*

VISION AND MISSION OF BINA ANAPRASA

1. ***VISION**: To build qualified human resources and prosperous family*

2. ***MISSION**: To fight for healthy, smart, cheerful children with good characters especially among the unfortunate community and to improve family welfare.*

THE OBJECTIVE OF BINA ANAPRASA

- ***General Objective :***
  To build a healthy, smart and cheerful child and to develop the child's good character traits. This objective relies on the support of family, society and local potencies.

masyarakat.

4. Membangun keluarga berwawasan gender.

KIAT MENDIRIKAN BINA ANAPRASA SECARA BERKELANJUTAN

1. Identifikasi Potensi siwa.
2. Membangun Komitmen bersama dengan Aparat setempat.
3. Kiat Penyediaan Sekolah/Bangunan.
4. Kiat Mendapatkan Guru/Pengasuh yang Peduli.

MENINGKATKAN KUALITAS BINA ANAPRASA

Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas Bina Anaprasa antara lain :

1. Kegiatan Pelatihan-Pelatihan.
2. Kegiatan Lomba baik bagi Anak/Siswa dan Guru.
3. Kegiatan Penggung Gembira Anak.

SUMBER DANA BINA ANAPRASA

Dalam Upaya pembiayaan Bina Anaprasa untuk saat ini jauh lebih mudah dan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti : Diknas Melalui Dana Rintisan, Dana Pembangunan Desa, CSR perusahaan, dana Hibah, Funding luar negeri dll.

Oleh : Sumadi –
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Timur

- ***Specific Objective :***
  1. *To make information and services regarding early child education and health more accessible for villagers.*
  2. *To improve the involvement of family planning, education on health, life skills and family economy.*
  3. *To reinforce the role of family and community.*
  4. *To build gender-perspective based family.*

BELOW ARE GUIDELINES ON ESTABILISHING SUSTAINABLE BINA ANAPRASA

1. *To ensure a potential student.*
2. *A shared commitment with local authorities.*
3. *As for the school building.*
4. *Guidelines on hiring caring teacher/tutor*

IMPROVING THE QUALITY OF BINA ANAPRASA

Below are some activities to improve the quality of Bina Anaprasa:

1. *Training activities*
2. *Competition activities both for students and teachers*
3. *Children Performance Activities.*

FUNDING RESOURCE FOR BINA ANAPRASA

As for the funding, at the moment the funding can be easily obtained through various resources such as: The National Education Department (DIKNAS) through aid for school pioneering (Dana Rintisan), Village Development Fund (Dana Pembangunan Desa), Grant, Foreign Funding, etc.

Written by : Sumadi –
Executive Director of East Kalimantan Chapter

Mengawal Keberlanjutan Melalui Kaderisasi Anggota Remaja

Maintaining Sustainability Through Youth Member Regeneration

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah salah satu organisasi non pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM)/ Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia. Merujuk UU No. 17 tahun 2013, PKBI adalah salah satu organisasi masyarakat yang berbadan hukum dengan bentuk perkumpulan (lihat pasal 10 ayat (1) dan (2), dan pasal 11 ayat (1). Selanjutnya pasal 11 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.

Keberadaan anggota memiliki peranan yang sangat strategis bagi kesinambungan, pencapaian visi dan misi serta pencapaian tujuan didirikannya organisasi (PKBI-red). Anggota PKBI adalah subyek dan sekaligus penerima manfaat program yang dijalankan oleh PKBI. Akan tetapi keberadaan serta peran strategis anggota ini belum berfungsi secara maksimal. Keterlibatan pengurus di masing-masing tingkatan dianggap sudah cukup mewakili keterlibatan anggota. Sehingga yang terjadi adalah "orangnya itu lagi – itu lagi".

Banyak faktor yang menjadi penyebab,diantaranya hampir disemua tingkatan organisasi, eksistensi PKBI realitasnya ditentukan oleh keberadaan proyek sebagai amunisi utama organisasi, bukan keberadaan anggota sebagai sumber daya utama perkumpulan untuk merespon problematika kependudukan dan kesehatan reproduksi yang terjadi di sekitarnya.

Selanjutnya, terjadi kemandegan atau paling tidak terjadi kelambanan dalam upaya kaderisasi di PKBI. Hal ini tercermin dari data base anggota dari tahun ke tahun didominasi oleh nama-nama pengurus dan pelaksana saja, tanpa ada penambahan nama-nama

The Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) is one of non-governmental organizations (NGO) or societal organizations in Indonesia. Referring to the Societal Organizations Law No. 17 2013, IPPA is an association that falls under the category of "societal organization with legal entity status" (see article 10 paragraph (1) and (2), and article 11 paragraph (1)). Furthermore, the article 11 paragraph (2) confirmed that societal organization with legal entity status is a member-based organization.

The existence of members has a very strategic role for the sustainability and the achieving of the organization's vision, mission and goals (IPPA-red). IPPA members are not only the subjects but also the beneficiaries of the organization's programs. However, members' existence and strategic role were not yet optimally functioning. The involvement of the boards in each level was considered enough to represent members. Therefore, organizational activities were always taken care of by the same persons.

Many factors led to this problem, for instance, the existence of IPPA, in reality, is determined by projects as its main arsenal, and not by the existence of members as the organization's prime resources to address the population and reproductive issues within their respective neighborhood.

For that reason, the regeneration process is halted or taking a very slow pace, if any. This is reflected by members' database, which from time to time, is dominated by names of the board and executive without a consistent addition of new names outside the board and executive.

baru di luar pengurus dan pelaksana secara konsisten.

Problem di atas terjadi karena pola rekrutmen tidak dilakukan secara terstruktur dan konsisten, serta pencatatan tidak dilakukan secara tertib administrasi. Selain itu PKBI tidak mampu menggali secara maksimal ekpektasi dari individu-individu yang tertarik bergabung dengan PKBI.

Melalui Munas PKBI XV tahun 2014 di Kupang NTT, PKBI menyadari betul akan pentingnya kaderisasi. Sehingga secara mendasar terjadi perubahan sistem keanggotaan di AD/ART. Rekrutmen anggota remaja menjadi mandat organisasi secara eksplisit (lihat pasal 11 tentang keanggotaan).

Beberapa PKBI Cabang di Daerah Jawa Barat, salah satunya PKBI Cabang Cirebon telah melakukan upaya sebagai wujud komitmen pentingnya kaderisasi anggota di PKBI, khususnya anggota muda (remaja-red). Kegiatan rekrutmen anggota remaja di PKBI Cabang Cirebon dilakukan secara terstruktur dan rutin, melalui pelatihan kesehatan reproduksi tingkat dasar bagi remaja dalam 3 (tiga) kategori usia.

Pelatihan Kespro Dasar bagi Remaja; Upaya rekrutmen anggota muda dan kaderisasi organisasi untuk keberlanjutan

Perjalanan program PKBI di Cirebon selama kurang lebih 14 tahun sampai dengan tahun 2015 ini, tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan sumber dana yang diperoleh dari kerjasama dengan berbagai pihak. Pengurus cabang PKBI Cirebon meyakini bahwa besarnya organisasi sangat bergantung pada bagaimana tata kelola organisasi yang dijalankan dimana salah satu pointnya adalah bagaimana membuat sistem kaderisasi yang diterapkan pada organisasi tersebut.

The above problem occurred due to the unorganized and inconsistent recruitment patterns and scrappy administrative record. In addition, IPPA was unable to optimally explore the expectation of people who were interested in joining the organization.

Through IPPA 15th National Conference (Munas) 2014 in Kupang NTT, IPPA was well aware of the importance of regeneration, thus a fundamental change regarding the organization's membership system was made in the organization's Articles of Association. Recruitment of youth member became an explicit mandate for the organization (see article 11 on membership).

To show its commitment, several IPPA branches in West Java, one of them was IPPA Cirebon Branch, conducted member regeneration especially for the youth member (youth-red). IPPA Cirebon conducted organized and regular youth member recruitment through the Basic Reproductive Health training that was divided into three age categories.

Reproductive Health Training for Youth: The Effort to Recruit Youth Member and Organization Regeneration for Sustainability.

The journey of IPPA program in Cirebon for the past 14 years is never without the support of human resources and fund obtained by collaboration with various parties. IPPA Cirebon staff believes that the size of an organization depends heavily on the management, in which the organization regeneration system became one of the main points applied.

Mengacu pada hal tersebut, sejak tahun 2006 dimana saat itu tidak ada lagi funding khusus yang mendanai program remaja sampai sekarang, PKBI Cirebon secara kontinyu setiap tahun melakukan kegiatan Pelatihan Kespro tingkat dasar bagi remaja.

Pelatihan kespro yang dilakukan oleh PKBI Cirebon, dibagi ke dalam tiga kategori usia, yaitu; Usia 13-15 tahun (remaja setingkat SMP), Usia 15 – 18 tahun (remaja setingkat SMA), dan 20 – 24 tahun (remaja setingkat perguruan tinggi). Pengklasifikasian usia tersebut dimaksudkan untuk mempermudah peserta dan fasilitator dalam menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia tumbuh kembang remaja tersebut.

Hasil yang didapat dari kegiatan ini, selain semakin bertambahnya cakupan remaja yang terpapar informasi kesehatan reproduksi, juga sebagai pintu awal bagi semakin banyaknya relawan-relawan yang berdedikasi di PKBI serta memperjuangkan isu-isu PKBI yang selanjutnya bergabung menjadi anggota PKBI. Selain itu melalui kegiatan pelatihan kespro dasar ini telah menjadi salah satu program unggulan di PKBI Cabang Cirebon yang kemudian memberikan dampak bagi eksistensi organisasi ini.

Strategi ini penting untuk dilakukan selain menjawab persoalan rekrutmen secara rutin dalam upaya kaderisasi organisasi, juga diharapkan mampu menjawab ekspektasi setiap individu muda yang hendak bergabung di PKBI.

Semoga.....

Oleh : Dian Mardiana - Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Barat & Hermawan - Pelaksana PKBI Cabang Cirebon

In reference to this matter, as there has been no special fund for youth program since 2006 until now, IPPA Cirebon continuously conducts basic Reproductive Health training for youth annually.

The reproductive health training in IPPA Cirebon is intended for youth and divided into three categories based on age groups: age 13-15 years (Junior High youth), age of 15-18 years (Senior High youth) and age of 20-24 years (University level-youth). The age classification is intended to facilitate the participants and the facilitator in presenting the material on reproductive health that is in accordance with the needs of the respective group.

As a result of the trainings, there are more youth who are well-informed about reproductive health. And this is the first step to more dedicated volunteers who are willing to fight for IPPA issues before finally becoming IPPA members. Besides that, the Basic Reproductive Health training has become one of the key programs in IPPA Cirebon Branch that gives positive impact for the organization's existence.

This strategy is important not only as a regular solution for recruitment problem and organization's regeneration but also to enable IPPA to meet the expectation of youth who wants to join IPPA.

Hopefully....

Written By : Dian Mardiana - Executive Director of West Java Chapter & Hermawan - Officer IPPA Branch Cirebon

Mobilisasi Dana, Investasi dan Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Organisasi

Mobilization of Fund, Investment and Business in Improving Organization's Independency

Pendahuluan

Entitas organisasi nirlaba atau dikenal juga dengan lembaga swadaya masyarakat, tidak dapat dipungkiri kiprahnya dalam pembangunan. Pendanaan adalah hal terpenting untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pendanaan yang berasal dari lembaga donor, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Corporate Social Responsible (CSR) bahkan juga Pemerintah sangat mempengaruhi lembaga.

PKBI yang merupakan salah satu LSM tertua di Indonesia, dan telah menjadi perintis dan pelopor di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi masih juga bergantung pada lembaga donor dalam menggerakkan roda-roda programnya. Sebagai awal pengembangan program, PKBI melakukan kegiatan swadaya berbasis kerelawanan. Untuk menunjang keberlanjutan program, maka diperlukan program kewiraswastaan sosial bagi suatu organisasi.

Mobilisasi Dana

Upaya mobilisasi dana semakin intensif seiring dengan perkembangan kebutuhan program yang semakin

Introduction

The work of non-profit organizations or also known as non-governmental organizations is undoubtedly important for a country's development. As for non profit organizations, funding is the most important thing for the organization sustainability. The funding that comes from various donor institutions, the United Nations (UN), Corporate Social Responsibility (CSR) even from the government also plays a major role in sustaining the organization.

As one of the oldest NGOs in Indonesia that also pioneered programs in the field of population, Family Planning and reproductive health, IPPA too still relies on donor institution for implementing its programs. In the beginning of its program development, all IPPA activities were volunteer-based. In order to support the program sustainability, IPPA needs to integrate social entrepreneurship into its program.

Fund Mobilization

Fund mobilization efforts become intensified as programs' needs increases through the improving

besar, melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga Internasional, terutama lembaga donor dan lembaga PBB (UNFPA, WHO serta lembaga lainnya). Sejak tahun 1982, PKBI mulai mengembangkan pelayanan yang bersifat cost recovery untuk perluasan skala program dan sustainability, yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah kewiraswastaan sosial atau "social enterprise" .

Banyak ragam dalam mobilisasi sumber dana yang dapat diklasifikasikan secara internal dan eksternal. Secara internal dapat berupa Pengumpulan Iuran dan sumbangan dari Anggota/Relawan Perkumpulan, sumbangan dari staf, pendapatan dari Pengembangan Program dan mengembangkan bisnis.

Sedangkan untuk eksternal berupa pengembangan jaringan kerja dengan berbagai pihak melalui kerja sama dalam pengembangan program, melakukan pendekatan untuk memperoleh sumbangan dana atau hibah dalam bentuk tunai atau non tunai seperti tanah.

Pemasukan Pendapatan LSM dari jasa layanan merupakan salah satu Karakter LSM Gelombang ketiga yang diadaptasi dari Teori Gelombang Ketiga (The Third Wave) Alvin Toffler (mengelola jasa dan mandiri), yang sumber dana nya tidak semata-mata bergantung pada donor. Jadi kegiatan mobilisasi dana menjadi bagian penting dalam strategi LSM.

PKBI yang merupakan LSM dalam bentuk Perkumpulan, secara hukum termasuk ke dalam Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-undang RI No.17 Tahun 2013, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) bahwa "ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Paal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. perkumpulan; atau b. yayasan"

Dalam Pasal 37 ayat (1) "Keuangan Ormas dapat bersumber dari: a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat; c. hasil usaha Ormas; d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah".

Hal tersebut diatas selain mengindikasikan bolehnya LSM (Perkumpulan) mengembangkan kegiatan usaha (bisnis), juga mendasari kegiatan mobilisasi dana dikalangan LSM. Dasar pengembangan usaha (bisnis) di lingkungan PKBI diatur dalam Anggaran Dasar Bab XI Pasal 24 tentang Badan Usaha.

Dalam Rencana strategi 2010-2020 sudah jelas bahwa mobilisasi dana termasuk dalam strategi PKBI yang ke 5, yaitu: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya organisasi, dan Tujuan ke 3 yaitu: Meningkatkan kemandirian organisasi, dengan hasil yang diharapkan, dengan begitu

collaboration between IPPA and international institutions, especially donor and UN institutions (UNFPA, WHO and others). In 1982, IPPA began developing cost recovery services, which lately known as social enterprise, for program scale expansion and sustainability.

There are various mobilization of financial resources that can be classified as internal and external mobilization. Internally, this mobilization of resources can be in the form of cost collection, member or volunteer contribution, staff contribution, program and business development profit.

Externally, mobilization financial resources can take form as network development with several parties through program development collaboration, approaches for acquiring donations or grants either in cash or non cash (like land).

As adopted from the Third Wave theory by Alvin Toffler, generating revenues from services is one of the Characteristics of Third Wave NGOs. In the third wave society, NGOs financial resources do not solely rely on donors. Therefore, fund mobilization becomes an important part of NGO's strategy.

Referring to the Societal Organization Law No. 17/2013 article 11 paragraph (1) "societal organizations with legal entity, referred to article 10 paragraph (1) letter a, includes: a. association; or b. foundation", IPPA falls under the category of Societal Organization.

As stated in the article 37 paragraph (1) "Mass organizations' finance can be sourced from: a. membership dues; b. society donation/assistance; c. organization's enterprise; d. foreign aid/donation; e. other legal activities; and/or f. state or local government budget"

The above mentioned law permits NGOs (associations) to develop business, as well as to mobilize its fund. As for IPPA, the organization's business development principle is stipulated in the Statutes Chapter XI Article 24 on Enterprises.

In the Strategic Planning 2010-2013, besides included in IPPA fifth strategies: Improving institutional capacity and organization resources, fund mobilization is also mentioned in the third Objectives: Improving organization's independence, with expected results, thus organization can

organisasi secara mandiri dalam menjalankan seluruh program-programnya.

Dalam menjalankan proses kemandirian tersebut, banyak tantangan yang dihadapi, antara lain: masih sedikitnya PKBI Daerah/Cabang yang memiliki sumber dana sendiri khususnya dana internal yang bersumber dari program layanan (seperti klinik) dan unit usaha (bisnis). Melihat kondisi tersebut di atas, maka organisasi harus bekerja ekstra dan intensif serta memiliki perencanaan yang baik sehingga hambatan yang ada menjadi pendorong dan motivasi organisasi dalam mewujudkan kemandiriannya.

Ketika disandingkan dengan pengelolaan anggaran dengan prinsip manajemen surplus, mobilisasi dana memiliki peran yang jelas dalam memupuk modal dan asset. Sesuai dengan kebijakan PKBI yang disahkan dalam Munas XV tahun 2014 Nomor 8,(butir 8.1: PKBI di seluruh tingkatan organisasi mempunyai strategi untuk memastikan keberlangsungan keuangan organisasi, 8.2 Pernecanaan anggaran tahunan berbasis anggaran surplus), anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung program organisasi tidak akan lebih besar dari pendapatan organisasi.

Begitupula dengan aset, dalam PKBI, investasi merupakan salah satu kebijakan yang berlaku di seluruh tingkatan organisasi.

Mengelola Working Capital

Langkah awal dalam mengelola keuangan organisasi yang mandiri adalah mengelola modal kerja (working capital), agar mencapai titik ideal dengan maksimal kenaikannya 10% untuk anggaran tahun berikutnya.

Dengan adanya pengelolaan modal kerja, posisi organisasi juga dapat diperkuat apabila dihadapkan pada mitra CSR yang memiliki sistem penyaluran dana reimburse. Sehingga keberanian organisasi dalam pengelolaan working capital berdampak pada meningkatnya peluang CSR.

Investasi dan Bisnis Ke Depan

Banyak model yang dikembangkan suatu organisasi dalam mengembangkan investasinya. PKBI sebagai organisasi yang sadar akan pentingnya investasi memilih untuk mengembangkan model investasi dengan Instrumen Deposito, Reksa Dana (PKBI Pusat dan DIY), dan Emas (DIY), sedangkan untuk sector riil dengan cara pengembangan wisma (Pusat, Jabar, Jateng, Jambi dan Lampung), dan Perkebunan (Bengkulu).

Investasi dalam bisnis wisma terutama yang dikelola PKBI Pusat memberikan profit yang sangat menguntungkan, dan

independently implement all its programs.

On the process of becoming independent, IPPA meets a lot of challenges: there are only few Chapters/Branches that have independent financial resources especially internal fund from services program like clinic and business. With regards to this condition, the organization must work harder and more intensively and also create a good planning to transform challenges into motivation for becoming a self-reliant organization.

When juxtaposed with surplus management principle-based budget management, fund mobilization has an obvious role in fostering organization capital and assets. In accordance with IPPA policy that was established in Munas XV 2014, Number 8 (point 8.1: in all levels of organization, IPPA has strategy to ensure the financial sustainability of the organization, 8.2. Surplus-based annual budget planning), the budget spent to support organization activities will not exceed the organization income.

As for assets, in IPPA, investment is one of the policies that applies in all levels of organization.

Managing Working Capital

The initial step in financial management for a self-reliant organization is to manage its working capital to achieve ideal point where there's a 10% increase for next year's budget.

With working capital management, the organization position can also be strengthened when confronted with a CSR partner who applies reimbursement fund distribution system. In other words, organization's courage in managing working capital resulted in increased CSR opportunity.

Investment and Business in the Future

There are many investment models developed by an organization in developing its investment. As an organization that is aware of the importance of investment, IPPA chooses to develop its investment model through deposit instrument, Reksa Dana (for IPPA HQ and DIY), and gold (for IPPA DIY). While for real sector, IPPA (HQ, West Java, Central Java, Jambi and Lampung) manages and develops its guesthouses and plantation (IPPA Bengkulu).

Investment in the guesthouse business especially the one managed by IPPA HQ has been very profitable.

menjadi andalan untuk menutupi biaya over head cost PKBI atau biaya tidak langsung (indirect cost - non program) dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal di atas sangat membantu mengingat menurunnya nilai dan proporsi bantuan IPPF, sumber untuk personnel cost dan pendukung proyek serta AGS staf tetap.

Dengan demikian, IPPA Daerah/Cabang harus secara intensif meningkatkan bisnis jasa wisma untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Mulai akhir tahun 2014, PKBI Pusat merintis pengembangan wisma Kebon Kacang untuk dikembangkan menjadi hotel setara bintang dua dengan kapasitas sekitar 74 kamar, kita sudah menjajaki kerja sama dengan perbankan untuk pendanaan pembangunan wisma tersebut.

Sesuai dengan amanah Munas 2014 di Kupang, upaya mobilisasi dana dan investasi kita laksanakan lebih intensif. Untuk itu PKBI mengaktifkan kembali kerjasama dengan PT Bakti Grahasta Mandiri (BGM) untuk mengelola aktivitas bisnis PKBI.

PKBI Daerah dan Cabang dapat mengembangkan bisnis melaui kerja sama dengan PT BGM. Model hubungan bisnis dengan PKBI Daerah/Cabang akan dikembangkan beberapa alternatif.

Nanang Munajat –
Pjs. Direktur Eksekutif PKBI

The profit has been a mainstay in covering the organization's over head cost or indirect cost-non program in the past five years. This kind of investment is a great support for the organization, as the value and portion of aid from IPPF decreases while expenses for personnel cost, project support and permanent staff AGS remain the same.

Therefore, all IPPA Chapters and Branches must intensively improve the guesthouse business to obtain maximum profit.

At the end of 2014, IPPA HQ started to develop Kebon Kacang Guesthouse to become a hotel (equals with 2 stars hotel) that will have 74 rooms. IPPA has probed the cooperation with banks to finance the construction of the new hotel.

In accordance with the mandate of Munas 2014 in Kupang, efforts in fund and investment mobilization must be conducted more intensively. Thus, IPPA reactivated its partnership with PT Bakti Grahasta Mandiri (BGM) to manage IPPA business activities

IPPA Chapters and Branches not only can develop their business but also can explore several alternative models for their business relationship.

Nanang Munajat –
Acting Executive Director

Governing Council IPPF-Headquarter

Pada acara Regional Meeting IPPF ESEAOR 28-29 June 2014 di Malacca (Malaysia) Napoleon Hernandez terpilih sebagai Chairperson, sedangkan Atashendartini Habsjah (Wakil dari PKBI) terpilih sebagai Bendahara IPPF-ESEAOR periode 2014-2017. Setiap tahunnya kedua wakil terpilih ini harus mengikuti Governing Council IPPF-Headquarter di London.

Acara Governing Council IPPF-Headquarter yang berlangsung di London setiap tahun merupakan Badan Tertinggi di struktur IPPF yang dipimpin langsung oleh Presiden Naomi Seboni dan dihadiri oleh 24 anggota yang berasal dari 6 Regional Executive Committees (mewakili 170 negara).

Atashendartini Habsjah sebagai orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai bendahara IPPF-ESEAOR menghadiri acara Governing Council pertamanya pada tanggal 26-29 November 2014 di London.

Ditulis oleh : Atashendartini Habsjah, MA

During the IPPF Regional Meeting IPPF ESEAOR on June 28th-29th, 2014 in Malacca (Malaysia), Napoleon Hernandez was elected as IPPF-ESEAOR Chairperson, while Atashendartini Habsjah (IPPA Representative) was elected as the Treasurer for period of service 2014-2017. Each year, the two elected representatives must participate in the Governing Council IPPF-Headquarter in London.

The Governing Council IPPF-Headquarter which is held annually in London is the highest council of IPPF. The council is directly led by President Naomi Seboni and attended by 24 members from 6 Regional Executive Committees (representing 170 countries).

As the first Indonesian elected to serve as the treasurer for IPPF-ESEAOR, Atashendartini Habsjah attended her first Governing Council on November 26th-29th in London.

Written by : Atashendartini Habsjah, MA

Peraturan Pemerintah No.61/2014

Government Regulation Number 61/2014

Paska diterbitkannya PP No.61 tahun 2014 tanggal 14 Juli, pro kontra terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Media massa dan media elektronik terus menerus membahasnya. Pembahasan menjadi "booming" dengan istilah PP Aborsi bukan PP Kesehatan Reproduksi. Dalam hal pro kontra tentang istilah ini Menteri Kesehatan (Ibu Nafsiah Mboi) menegaskan bahwa "tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang aborsi. Aturan yang terbit adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi".

Menyikapi keluarnya PP tersebut, pada tanggal 16 September 2014, PKBI sebagai LSM yang bergerak di bidang kesehatan kesehatan seksual dan reproduksi menginisiasi diadakannya pertemuan bersama mitra jaringan. Rekomendasi pertemuan tersebut adalah (1) Mencabut PP (PP dinilai mengusung konsep patriaki, heteronormatifitas hanya mengacu pada perkawinan yang sah menurut negara. PP ini tidak melihat aspek keseluruhan (difabel dan HIV tidak diperhatikan) (2) Karena PP sudah di "launching" tidak mungkin untuk dicabut, maka mengawal Permenkes menjadi prioritas (3) Membuat jaringan untuk melakukan advokasi bersama.

Rencananya dari PP No.61 tahun 2014, akan ada 4 PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) yaitu (a) PMK tentang pelatihan & pelayanan tindakan aborsi (b) Pelayanan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah (c) Permenkes tentang sanksi administrative dan (d) Permenkes tentang konseling.

Untuk mengawal proses penyusunan PMK, PKBI bersama mitra jaringan melakukan advokasi dengan memanfaatkan potensi jaringan baik secara kolektif maupun individu dimasing-masing isu, serta menambahkan sosialisasi PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi terutama pada bagian aborsi aman. Sebagai informasi, hingga saat ini tidak sedikit perempuan yang melakukan upaya unsafe abortion (aborsi tidak aman) yang berakibat pada perdarahan dan berujung pada kematian perempuan

Ditulis oleh: Ary Bumi Kartini (Pelaksana Proyek GCAC)

The pros and cons among the general public has yet to die down following the issuance of the Government Regulation Number 61/2014 on July 14th. Both mass and electronic media have been discussing it continuously. The discussion was "booming" as the government introduced the Government Regulation on Abortion (PP ABORSI) instead of the Government Regulation on Reproductive Health (PP KESEHATAN REPRODUKSI). In regards to the term used in the society, the Ministry of Health (Mrs. Nafsiah Mboi) however confirmed that "There's no government regulation that rules abortion. The issued regulation was the Government Regulation Number 61/2014 on Reproductive Health."

To respond to the issuance of the Govt. Regulation, as a Non-Profit Organization that focuses on sexual and reproductive health, IPPA initiated a meeting with network partners on 16 September 2014. The recommendations for the meeting were (1) to annul the Government Regulation (the Government Regulation was considered to uphold patriarchy, heteronormativity concept that refers only to marriage that legalized by the country. This Govt. Regulation does not include all aspects of community (people with disabilities and HIV are excluded) (2) If the issuance of the Govt. Regulation could not be annulled, then protecting Regulation of Ministry of Health becomes a priority (3) to create a network for joint advocacy.

The Govt. Regulation No. 61 will have four Regulations of the Ministry of Health (PMK) that is planned to be enclosed in the Govt. Regulation Number 61/2014: (a) PMK on the training and services for abortion (b) Services with assistance or unnatural pregnancies (c) PMK on administrative sanction and (d) PMK on counseling.

To guard the PMK's development, together with network partners, IPPA will conduct advocacy on each issue by utilizing the network's potency both collectively and individually. In addition, IPPA will also conduct socialization for Govt. Regulation on Reproductive Health especially on safe abortion part. As information, to date many women who try to conduct unsafe abortion end up suffering from bleeding that leads to death.

Written by : Ary Bumi Kartini (GCAC Project Officer)

REMBUG KADER NASIONAL PUSAT INFORMASI KESEHATAN MASYARAKAT (PIKM)

Merajut Komunikasi Kader Masyarakat dan Pemerintah

THE GATHERING OF PUBLIC HEALTH INFORMATION CENTER (PIKM) NATIONAL CADRE

Building Communication between Community Cadres and Government

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia mengadakan Rembug Kader Nasional, 11-13 Maret di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 109 Kader Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (PIKM) dari 82 Kab/ Kota, 12 Provinsi di Indonesia.

Rembug Kader Nasional diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Kader dalam memberikan informasi HIV & AIDS, mengorganisir masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang disediakan pemerintah serta memberikan dukungan kepada Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA).

Sehari sebelumnya, 10 Maret, para kader berkesempatan berdialog dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Nafsiah Mboi di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta. Dialog ini dimanfaatkan Kader untuk bercerita keberhasilan dan kendala terkait penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungannya.

Akses layanan dan ketersediaan obat maupun reagen di daerah menjadi hambatan yang dikeluhkan Kader di depan Menkes. Padahal mereka sudah bekerja maksimal dalam mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan dengan cara memeriksakan kesehatannya dan melakukan Tes HIV. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan Masyarakat khususnya Ibu dan Anak dari HIV.

Untuk itu, para kader mengharapkan peran aktif pemerintah untuk memberikan akses layanan seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, dialog semacam ini juga harusnya lebih rutin dilaksanakan, agar adanya komunikasi yang kondusif antara kader masyarakat dengan pemerintah.

(Rianto A.Syakur-Pelaksana Proyek GF)

The Indonesian Planned Parenthood Association held a National Cadre Gathering on 11-13 March in Bumi Perkemahan Cibubur, West Java. The gathering was attended by 109 Public Health Information Center (PIKM) Cadres from 82 regencies/cities of 12 provinces in Indonesia participated in the gathering.

The National Cadre Gathering was held to improve Cadre's capacity in delivering HIV & AIDS related information, organizing public to access health services provided by the government, as well as giving supports to People Living with HIV and AIDS (ODHA).

On March 10, a day before the gathering, all cadres had the opportunity for open dialogue with the Indonesian Ministry of Health Nafsiah Mboi at the Ministry of Health office, in Kuningan, Jakarta. During the dialogue, Cadres shared their achievements and challenges in overcoming HIV and AIDS in their neighborhoods.

Challenges related to service accessibility and medicines and reagents availability in the regions became the main issues in the dialogue. Cadres had done their best in urging people to be more caring with their health by suggesting them to have medical examination and HIV test. This was done as an attempt to save people especially mothers and children from HIV.

In regards to this matter, cadres put expectation on the active role of government in giving access to health services to people nationwide. Furthermore, this dialogue should be held more regularly to create conducive communication between community cadres and the government.

(Rianto A.Syakur- GF Project Officer)

Peringatan HUT PKBI ke-57

IPPA 57th Anniversary

Penampilan Balukarna.

Hari Ulang Tahun PKBI ke -57 yang bertema " Remaja Bersatu Tunjukkan Karyamu Pada IBU" dilakukan pada hari Selasa, 23 Desember 2014 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

Sebagai panitia pada acara ini adalah remaja PKBI dari Youth Centre Centra Mitra Muda (CMM) PKBI DKI Jakarta dan staf PKBI Pusat. HUT PKBI yang jatuh berdekatan dengan Hari IBU merupakan momen bagi remaja PKBI untuk menunjukkan kreasi mereka kepada para IBU. Kegiatan ini di dukung juga oleh remaja dari berbagai sekolah di DKI Jakarta. Mereka berekspresi dalam bentuk menyanyi, menari, menggambar, bermain alat musik, hingga bermain drama musikal.

Berikut di bawah ini pendukung acara HUT PKBI :

1. AMAN Percussions, Marsya Idol ft. Indo Beatbox
2. Taman Suropati Chambers
3. Tarian Daerah Tuna Rungu
4. Story Telling Indonesia Mengajar
5. Performance Vidi Aldiano
6. The Professor
7. Dance for Life
8. Penampilan Drama Musikal Balukarna.

(Devi Fitriana : Staf Humas PKBI)

IPPA celebrated its 57th anniversary that came with a theme "Youth United to Show Creations to Mothers" on Tuesday 23 December 2014 at Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (Tim) Jakarta.

This event was organized by IPPA youth from the Youth Centre Centra Mitra Muda (CMM) IPPA DKI Jakarta and IPPA HQ. IPPA anniversary which was near the Mother's Day, became the perfect moment for IPPA Youth to show their creations to the Mothers.

Youth from various schools in DKI Jakarta also supported the event. They expressed themselves through singing, dancing, painting, musical instruments and musical drama.

Participants who contributed their performances on this special occasion are as follow:

1. *AMAN Percussions, Marsya Idol ft. Indo Beatbox*
2. *Taman Suropati Chambers*
3. *Tarian Daerah Tuna Rungu*
4. *Story Telling Indonesia Mengajar*
5. *Performance of Vidi Aldiano*
6. *The Professor*
7. *Dance for Life*
8. *Balukarna Musical Drama Performance*

(Devi Fitriana : IPPA Public Relation staff)

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : KEP-794/KM.1/2013

B K R
INTERNATIONAL
An Independent member of B K R International,
with offices throughout the world

This report is originally issued in Indonesian language

Nomor : R.11.2/024/09/15

Laporan Auditor Independen

Pengurus Nasional
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ("PKBI") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Number : R.11.2/024/09/15

Independent Auditors' Report

The National Board
Indonesian Planned Parenthood Association
Jakarta

We have audited the accompanying financial statements Indonesian Planned Parenthood Association (the "IPPA"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2014, and the statement of activities and the statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial Statements

Management is responsible for preparation and fair presentation of such financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, and for such internal control as managements determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Head office : Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940
Branch Office : Jl. Danau Jempang B3 No.29 Pejompongan - Jakarta 10210
Phone : (62-21) 5790 3548 Fax : (62-21) 5790 3548

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Sejak tanggal 1 April 2014, laporan keuangan PKBI tidak mencakup laporan keuangan Wisma PKBI Pusat, karena pengelolaannya telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dijelaskan pada catatan 21.

Laporan keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tanggal 31 Desember 2013 terlampir diaudit oleh independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 27 Juli 2015.

Auditors' Responsibility (Continued)

In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Indonesian Planned Parenthood Association as of December 31, 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Since April 1, 2014, the financial statements of IPPA did not included the financial statements of IPPA House Headquarter, regarding its management taken over by another party as described in note 21.

The accompanying financial statement of Indonesian Planned Parenthood Association as of December 31, 2013 were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on such financial statement on July 27, 2015.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik/*License Public Accountant No* AP.0410

Jakarta, 27 Juli 2015 / *July 27, 2015*

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
ENTITAS NIRLABA
LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2014
(Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dollar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
NON-PROFIT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2014
(Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

Translasi ke Dolar Amerika Serikat/*Translated into US Dollar*

		2014*			2013**		2014*		2013**
		Tidak terikat/	Terikat temporer	Jumlah/	Jumlah/	Tidak terikat/	Terikat temporer	Jumlah/	Jumlah/
	Catatan/ *Notes*	*Unrestricted*	*Temporary restricted*	*Total*	*Total*	*Unrestricted*	*Temporary restricted*	*Total*	*Total*
ASET/*ASSETS*									
Aset Lancar/ *Current Assets*									
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	2c,d,e,3,5	14.220.518.035	18.690.695.356	32.911.213.391	40.517.263.231	1.143.128	1.502.467	2.645.596	3.324.084
Piutang pada IPPF/ *Receivables from IPPF*	2e,3	-	611.241.763	611.241.763	-	-	49.135	49.135	-
Piutang lain-lain/ *Other receivables*	2e,f,3	804.517.952	-	804.517.952	228.018.091	64.672	-	64.671	18.707
Persediaan/ *Inventories*	2g,8	189.904.280	-	189.904.280	449.766.896	15.266	-	15.266	36.899
Uang muka dan biaya dibayar dimuka/ *Advance and prepaid expenses*	2c,3,7	74.983.815	1.519.717.764	1.594.701.579	604.779.163	6.0280	122.164	128.191	49.617
Investasi lain-lain - kurang dari satu tahun/ *Other investment - less than one year*	2c,2e,6	3.301.066.079	-	3.301.066.079	2.318.745.048	265.359	-	265.359	190.231
Jumlah Aset Lancar/ *Total Current Assets*	-	**18.590.990.161**	**20.821.654.883**	**39.412.645.044**	**44.118.572.429**	**1.494.453**	**1.673.766**	**3.168.219**	**3.619.538**
Bangunan dan peralatan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan/ *Properties and Equipments - net of accumulated depreciations*	2h,9	15.683.632.415	-	15.683.632.415	15.345.660.165	1.260.742	-	1.260.742	1.258.975
Investasi lain- lain - lebih dari satu tahun/ *Other investment - more than one year*	2c,2e	861.616.863	-	861.616.863	1.000.000.000	69.262	-	69.262	82.041

Jumlah Aset Tidak Lancar/ *Total Non - current Assets*	-	**16.545.249.278**	-	**16.545.249.278**	**16.345.660.165**	**1.330.004**	-	**1.330.004**	**1.341.016**
JUMLAH ASET/ TOTAL ASSETS	-	**35.136.239.439**	**20.821.654.883**	**55.957.894.322**	**60.464.232.594**	**2 .824.457**	**1 .673.766**	**4.498.223**	**4.960.554**

LIABILITAS/ *LIABILITIES*									
Utang usaha/ *Account payables*	11	478.090.262	559.395.313	1.037.485.575	505.472.909	38.432	44.967	83.399	41.469
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	10	-	98.399.629	98.399.629	515.103.680	-	7.910	7.910	42.258
Pendapatan ditangguhkan/ *Deferred incomes*	12	-	20.163.859.941	20.163.859.941	30.649.460.205	-	1.620.889	1.620.889	2.514.518
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Deferred incomes*	2k,20	4.398.251.131	-	4.398.251.131	5.751.914.460	353.557	-	353.557	471.894
Jumlah Liabilitias/ *Total Current Liabilities*		**4.876.341.393**	**20.821.654.883**	**25.697.996.276**	**37.421.951.254**	**391.989**	**1.673.766**	**2.065.755**	**3.070.139**
ASET NETO/ FUND BALANCES									
Dana yang diperuntukkan/ *Designated funds*	2j,13	1.836.247.399	-	1.836.247.399	2.457.080.205	147.608	-	147.608	201.581
Dana yang tidak diperuntukkan/ *Undesignated funds*	2j	12.550.113.952	-	12.550.113.952	4.789.774.074	1.008.852	-	1.008.852	392.960
Dana dalam persediaan/ *Inventory funds*	2g,j,8,14	189.904.280	-	189.904.280	449.766.896	15.266	-	15.266	36.899
Dana dalam aset tetap/ *Property and equipment funds*	2h,j,9,15	15.683.632.415	-	15.683.632.415	15.345.660.165	1.260.742	-	1.260.742	1.258.975
Jumlah Aset Neto/ Total Net Assets		**30.259.898.046**	**-**	**30.259.898.046**	**23.042.281.340**	**2.432.468**	**-**	**2.432.468**	**1.890.415**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO/ TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		**35.136.239.439**	**20.821.654.883**	**55.957.894.322**	**60.464.232.594**	**2.824.457**	**1.673.766**	**4.498.223**	**4.960.554**

*) Sejak tanggal 1 April 2014 laporan keuangan PKBI terpisah dari laporan keuangan Wisma PKBI
Since April 1, 2014 Wisma PKBI's financial statement not included in PKBI's financial statement
**) Laporan keuangan PKBI digabung dengan laporan keuangan Wisma PKBI
Wisma PKBI's financial statement included in PKBI's financial statement

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements are an intergral part of the financial statements take as a whole.

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
ENTITAS NIRLABA LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Disajikan dalam Rupiah dengan translasi ke Dollar Amerika Serikat)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
NON- PROFIT ENTITY STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
(Expressed in Rupiah with translation into United States Dollar)

Translasi ke Dolar Amerika Serikat/*Translated into US Dollar*

		2014*			2013**		2014*		2013**
		Tidak terikat/	Terikat temporer	Jumlah/	Jumlah/	Tidak terikat/	Terikat temporer	Jumlah/	Jumlah/
	Catatan/*Notes*	*Unrestricted*	*Temporary restricted*	*Total*	*Total*	*Unrestricted*	*Temporary restricted*	*Total*	*Total*
PENDAPATAN/*INCOMES*									
Pendapatan Donor/ *Grant Incomes*									
Donor kas dari IPPF/ *IPPF cash grants*	2h,16	3.399.646.370	8.744.681.809	12.144.328.179	6.941.600.095	273.283	702.949	976.232	767.826
Donor lainnya/ *Other donors*	2h,17	-	73.412.580.072	73.412.580.072	63.499.617.446	-	5.901.333	5.901.333	7.023.835
Donor dari pemerintah lokal/ *Local goverments*	2h,18	-	808.349.000	808.349.000	465.532.500	-	64.980	64.980	51.494
Realisasi atas : *Release of :*									
Aset neto dalam persediaan menjadi penerimaan/ *Net assets of inventory funds to income*		-	-	-	-	-	-	-	-
Aset neto dalam aset tetap menjadi penerimaan/ *Net assets of property and equipment to income*		-	-	-	7.432.899	-	-	-	822
Jumlah Pendapatan Donor/ *Total Grant Incomes*		**3.399.646.370**	**82.965.610.881**	**86.365.257.251**	**70.914.182.940**	**273.283**	**6.669.262**	**6.942.545**	**7.843.977**
Pendapatan Lain-lain/ *Others Incomes*									
Klinik/*Clinic*	2h	14.015.129.667	-	14.015.129.667	9.000.505.407	1.126.618	-	1.126.618	995.566
Program untuk peningkatan dana/ *Fund raising programs*	2h	15.263.268.818	-	15.263.268.818	25.219.183.666	1.226.951	-	1.226.951	2.786.218
Bunga/ *Interests*	2h	572.751.878	-	572.751.878	193.394.938	46.041	-	46.041	21.392
Lain-lain/ *Others*	2h	50.912.522	-	50.912.522	79.230.116	4.093	-	4.093	8 .763
Jumlah Pendapatan Lain-lain/ *Total Other Incomes*		**29.902.062.884**	**-**	**29.902.062.884**	**34.492.314.127**	**2.403.703**	**-**	**2.403.703**	**3.811.939**
JUMLAH PENDAPATAN/ *TOTAL INCOMES*		**33.301.709.254**	**82.965.610.881**	**116.267.320.135**	**105.406.497.067**	**2.676.986**	**6.669.262**	**9.346.248**	**11.655.916**

BIAYA/ *EXPENSES*									
Biaya Proyek per Strategi/ *Project Expenses per Strategy*									
Pemberdayaan anak, remaja, pemuda atas seks dan kesehatan reproduksi dan hak asasi (Strategi 1) *Empower children, adolecents and youth on sexual and reproductive health and rights (Strategy 1)*	2h,19	3.775.059.542	11.598.494.133	15.373.553.675	8.796.924.375	303.461	932.355	1.235.816	973.048
Perluasan akses terhadap informasi berkualitas, pendidikan dan jasa (Stategi 2) *Broaden the access to qualified information, education and services (Stategy 2)*	2h,19	13.681.238.875	10.475.172.855	24.156.411.730	21.991.295.578	1.099.778	842.056	1.941.834	2.432.507
Pengembangan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani IMS dan HIV/AIDS (Strategi 3) *Develop various efforts to prevent and to handle STI and HIV/AIDS (Strategy 3)*	2h,19	1.145.340.926	54.679.814.737	55.825.155.663	51.873.094.033	92.070	4.395.483	4.487.553	5.737.799
Pengembangan berbagai upaya untuk menangani kehamilan yang yang tidak diinginkan (Strategi 4) *Develop various efforts to prevent unwated pregnances (Strategy 4)*	2h,19	-	3.221.328.336	3.221.328.336	3.254.751.741	-	258.949	258.949	360.015
Advokasi (Strategi 5)/ *Advocactes (Strategy 5)*	2h,19	503.896.688	2.948.950.820	3.452.847.508	579.492.083	40.506	237.054	277.560	64.099
Jumlah Biaya Proyek/ *Total Projects Expenses*		**19.105.536.031**	**82.923.760.881**	**102.029.296.912**	**86.495.557.810**	**1.535.815**	**6.665.897**	**8.201.712**	**9.567.468**
Stategi pendukung/ *Supporting strategy*	2h,19	4.328.925.765	41.850.000	4.370.775.765	10.277.885.523	347.984	3.365	351.349	1.136.860
Proyek pendukung/ *Project support*	2h,19	5.187.965.191	-	5.187.965.191	3.523.934.376	417.039	-	417.039	389.790
Administrasi dan jasa umum/ *Administration and general services*	2h,19	6.363.792.778	-	6.363.792.778	7.581.299.251	511.559	-	511.559	838.585
Keuntungan (kerugian) aktuarial/ *Actuarial gain (losses)*	2h,19	-	-	-	(2.480.901.979)	-	-	-	(274.418)
JUMLAH BIAYA/ *TOTAL EXPENCES*	**2h,19**	**34.986.219.766**	**82.965.610.881**	**117.951.830.646**	**105.397.774.981**	**2.812.397**	**6.669.262**	**9.481.658**	**11.658.285**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH/ *INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS*		**(1.684.510.512)**	**-**	**(1.684.510.511)**	**8.722.086**	**(135.411)**	**-**	**(135.411)**	**(2.369)**
ASET NETO AWAL TAHUN/ *NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR*		**23.042.281.340**	**-**	**23.042.281.340**	**23.033.559.254**	**1.890.415**	**-**	**1.890.415**	**2.381.960**
Koreksi aset neto tahun lalu/ Adjustment for net asset prior year		**8.902.127.217**	**-**	**8.902.127.217**	**-**	**-**	**-**	**715.605**	**-**
SELISIH KURS AKIBAT PENJABARAN/ *CUMULATIVE TRANSLATION ADJUSMENTS*		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(38.141)**	**(489.176)**
ASET NETO AKHIR TAHUN/ *NET ASSETS AT ENDOF YEARS*		**30.259.898.046**	**-**	**30.259.898.046**	**23.042.281.340**	**1.755.004**	**-**	**2.432.468**	**1.890.415**

*) Sejak tanggal 1 April 2014 laporan keuangan PKBI terpisah dari laporan keuangan Wisma PKBI
Since April 1, 2014 Wisma PKBI's financial statement not included in PKBI's financial statement
**) Laporan keuangan PKBI digabung dengan laporan keuangan Wisma PKBI
Wisma PKBI's financial statement included in PKBI's financial statement

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements are an intergral part of the financial statements take as a whole.

TOBER 2014
ASTON

KEMUNDURAN DUNIA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN TAK LAGI AMAN
LAWAN KEKERASAN SEKSUAL!!

Visi 2020

Diskusi Politik Perempuan
"Kalo Cinta Kok Maksa ?"
Komite Aksi Perempuan (KAP)
Wisma PKBI, 15 Februari 2014

PKBI
DIALOG TERBUKA

Hak kesehatan seksual dan
reproduksi untuk semua
I decide

munas
PKBI XV IPPF
MUSYAWARAH NASIONAL XV
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Peran PKBI Dalam Menyongsong
Sustainable Development Goals (SDGs)
KUPANG - NTT, 9 - 12 OKTOBER 2014
ASTON

Daftar Alamat PKBI Seluruh Indonesia

List of IPPA Address Indonesia

PKBI DAERAH ACEH
Ketua Pengurus Daerah : Drs. Barlian AW
Direktur : Achmawaty Acmad
Jl. T. Nyak Arif No. 229, Lamgugop Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 7551235 Fax. (0651) 7551259 E-mail : pkbiaceh.nad@gmail.com; pkbiaceh@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SUMATERA UTARA
Ketua Pengurus Daerah : Dr. Cristoffel L. Tobing, SpOG, KFM
Direktur : Ramadani Hidayatin
Jl. Multatuli No. 34, Medan 20151, Telp. (061) 4514595, 4143302, 4142804 Fax. (061) 4147202 E-mail : pkbi_su@yahoo.co.id; pkbisumut@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SUMATERA BARAT
Ketua Pengurus Daerah : Prof. DR. Afrizal, MA
Direktur : Ir. Firdaus Jamal
Jl. Sultan Syahrir No. 50, Seberang Padang, Padang 25214, Telp. (0751) 39630, Fax. (0751) 39630 E-mail : pkbi_sumbar@yahoo.com; pkbisumbar@pkbi.or.id

PKBI DAERAH JAMBI
Ketua Pengurus Daerah : Rizky Takriyanti, M.Psi
Direktur : Helfi Rahmawati
Jl. Darah Jingga No. 49, RT. 05, Kelurahan Rajawali, Jambi 36143, Telp. (0741) 7554579, Fax. (0741) 7554579, E-mail : pkbi_jambi@yahoo.co.id; pkbijambi@pkbi.or.id

PKBI DAERAH BENGKULU
Ketua Pengurus Daerah : DR. Hadiwinarto, M.Psi
Direktur : Ir. Harmudya
Jl. Kapuas Raya No. 15, Bengkulu 38001, Telp. (0736) 25260, Fax. (0736) 625084, E-mail : pkbi.bengkulu@gmail.com; pkbibengkulu@pkbi.or.id

PKBI DAERAH LAMPUNG
Ketua Pengurus Daerah : Hj. Nuraini Effendi
Direktur : Herdimansyah
Jl. Abdi Negara I, Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung 35214, Telp. (0721) 487483, Fax. (0721) 483704, E-mail : pkbi_lpg1@yahoo.co.id; pkbilampung@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SUMATERA SELATAN
Ketua Pengurus Daerah : Dr. Erial Bahar, M.Sc
Direktur : Amirul Husni, SH
Jl. Kol. H. Burlian/Mahkamah Militer Km 6, Palembang, Telp. (0711) 420786, Fax. .(0711) 420786, E-mail : pkbisumsel@yahoo.com; pkbisumsel@pkbi.or.id

PKBI DAERAH DKI
Ketua Pengurus Daerah : Drs. Ahmad Fadjar
Direktur : Bonitha Merlina
Jl. Pisangan Baru Timur No. 2 Rt004/09 Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jatinegara - Jakarta Timur 13110, Telp. (021) 8566535, 8591001, Fax. (021) 85909885, E-mail : pkbidki@yahoo.co.id; pkbidki@pkbi.or.id

PKBI DAERAH JAWA BARAT
Ketua Pengurus Daerah : Rosmananda Romli, SKM, MTP
Direktur : Dian Mardiana
Jl. Soekarno Hatta No. 496, Bandung 40226, Telp. (022) 7567997, Fax. (022) 7514332, E-mail : pkbi.jabar@gmail.com; pkbijabar@pkbi.or.id

PKBI DAERAH JAWA TENGAH
Ketua Pengurus Daerah : Dr. Widoyono, MPH
Direktur : Elisabet Widyastuti
Jl. Jembawan No. 8, Semarang Barat 50145, Telp. (024) 7603503, 7601989, Fax. (024) 7601989, E-mail : pkbi.jateng@gmail.com; pkbijateng@pkbi.or.id

PKBI DAERAH YOGYAKARTA
Ketua Pengurus Daerah : Drs. Urip Bahagia
Direktur : Gama Triono
Jl. Tentara Rakyat Mataram, (Gg. Kapas), Yogyakarta 553121, Telp. (0274) 586767, Fax. (0274) 513566, E-mail : office@pkbi-diy.info; pkbidiy@pkbi.or.id

PKBI DAERAH JAWA TIMUR
Ketua Pengurus Daerah : Dra. Hj. Nurul Herlina, Apt.MS
Direktur : Okto Reno
Jl. Indra Giri No. 24, Surabaya 60341, Telp. (031) 5676694, 5687308, Fax. (031) 5664901 E-mail : pkbijatim@yahoo.com; pkbijatim@pkbi.or.id

PKBI DAERAH BALI
Ketua Pengurus Daerah :
DR. dr. Dyah Pradnyaparamita duarsa, MM, MSi
Direktur : I Ketut Sukananta, SH
Jl. Gatot Subroto IV/6, Denpasar 60341, Telp. (0361) 430214, Fax. (0361) 430214, E-mail : pkbibali@yahoo.com; pkbibali@pkbi.or.id

PKBI DAERAH NTB
Ketua Pengurus Daerah :
Dr. H. Mawardi Hamry, MPPM
Direktur : Satyawanti
Jl. Bung Karno No. 27, Mataram 83121 - Lombok, Telp. (0370) 626426, Fax. (0370) 643727
E-mail : pkbi_ntb05@yahoo.com; pkbintb@pkbi.or.id

PKBI DAERAH KALIMANTAN BARAT
Ketua Pengurus Daerah : Prof. Dr. Aunurrahman
Direktur : Mulyadi HDJ
Jl. Letjen Sutoyo No. 17A, Pontianak 78121, Telp. (0561) 743446, Fax. (0561) 748384, E-mail : mulhdj@gmail.com; pkbikalbar@pkbi.or.id

PKBI DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Ketua Pengurus Daerah : H. Yuherli, S.Sos
Direktur : Hapniah
Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 24A, Banjarmasin 70125, Telp. (0511) 302853, Fax. (0511) 302853
E-mail : pkbi.kalsel@gmail.com; pkbikalsel@pkbi.or.id

PKBI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Ketua Pengurus Daerah : Drs. H. Syahrir Basran
Direktur : Drs. Sumadi
Kompleks Voorfo Segiri, Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Samarinda 75123, Telp. (0541) 734751, Fax. (0541) 734751, E-mail : pkbik@yahoo.com; pkbikaltim@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SULAWESI UTARA
Ketua Pengurus Daerah : DR. Hetty Geru, M.Si
Direktur : Ir. Jennifer C. Mawikere
Jl. Achmad Yani No. 14, Lorong Gereja Pantekosta, Sario Tumpaan, Menado 95114, Telp. (0431) 862481, Fax. (0431) 877030, E-mail : pkbi.sulut@gmail.com; pkbisulut@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SULAWESI SELATAN
Ketua Pengurus Daerah :
Ir.Hj.Apiaty Amin Syam, M.Si
Direktur : Iskandar Harun, ST
Jl. Landak Baru No. 55, Ujung Pandang 90135, Telp. (0411) 871051, Fax. (0411) 877106, E-mail : pkbi_ss@yahoo.com; pkbisulsel@pkbi.or.id

PKBI DAERAH PAPUA
Ketua Pengurus Daerah : Charles Brabar, SE
Direktur : Lilis R.
Komplek Vuria Indah, Jl. Angsa Selatan No. 186 Kotaraja, Jayapura 99225 Papua, Telp.(0967) 582415 Fax. (0967) 586291, E-mail : pkbipapua@yahoo.co.id; pkbipapua@pkbi.or.id

PKBI DAERAH RIAU
Ketua Pengurus Daerah : Dr. H. Mursal Amir
Direktur : Asniaty
Jl. Lobak/Asparagus No. 1, Kec. Tampan - Pekan Baru, Riau, Telp. 0823 - 90256600, Email : pkbi_riau@yahoo.co.id; pkbiriau@pkbi.or.id

PKBI DAERAH NTT
Ketua Pengurus Daerah :
Lusia Adinda Lebu Raya
Direktur : Markus Alibrandi
Jl. Basuki Rachmat No. 2, Kupang 85117, Telp. (0380) 822270, 826825, 831969, Fax. (0380) 828888, E-mail : ippa_ntt@yahoo.com; pkbintt@pkbi.or.id

PKBI DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Ketua Pengurus Daerah : DR. H. Jairi, M.Pd
Direktur : Drs. Mirhan
Jl. Putri Junjung Buih No. 38A, Palangkaraya 73113, Telp. (0536) 38290, Fax. (0536) 38290
Email : pkbi.kalteng@gmail.com; pkbikalteng@pkbi.or.id

PKBI DAERAH SULAWESI TENGAH
Ketua Pengurus Daerah :
Drs. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si
Direktur : Yospina Liku Labi
Jl. Prue Bongo Lr. Lekatu No. 7 Palu, Telp. (0451) 452178, Fax. (0451) 452178, E-mail : kirim4u@yahoo.com; pkbisulteng@pkbi.or.id

PKBI PAPUA BARAT
Ketua Pengurus Daerah : Agus Sunarya
Direktur : Olaf Frans Krey, S.Sos
Jalan Gunung Salju No. 25, Kelurahan Amban, Manokwari Barat 98312, Manokwari – Papua Barat, E-mail : pkbipapuabarat@yahoo.co.id; pkbipapuabarat@pkbi.or.id

PKBI KEPULAUAN RIAU
Ketua Pengurus Daerah :
Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP
Direktur : Ahmad Syahroni
Jl. Darussalam No. 13, Rt 02/ Rw 04. Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, Telp : 0771 - 315208, Fax : -
E-mail : pkbi.kepri@gmail.com; pkbikepri@pkbi.or.id

PKBI DAERAH BANTEN
Gedung BKKBN, Propinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B), Ketua Pengurus Daerah : Drs. H. Sukardi, M.Kes

PKBI PUSAT
Wisma PKBI, Jl. Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Telp. 021 – 7207372, 7394123, Fax : 021 – 7394088,
E-mail : ippa@pkbi.or.id

IPPA EXECUTIVE HEAD QUARTER

EXECUTIVE DIRECTOR'S OFFICE

Executive Director	: Inang Winarso
Vice Executive Director	: Nanang Munajat
Internal Auditor	: Iriyanto
Head of Secretariat & General Affairs	: Cindy Cinaraputri
Public Relation	: Devi Fitriana

HEAD OF SECTION

Planning and Development	: Erry H.Kamka
Program Implementation	: Fahmi Arizal
Governance and Human Resources Development	: Chatarina Wahyurini
Finance	: Hadi Prayitno
IPPA's House Manager	: Herry Purwantoro

BOARD of IPPA 2014-2018

Chairperson	: Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, Sp.OG
Vice Chairperson I	: Atashendartini Habsjah, MA
Vice Chairperson II	: DR. Budi Wahyuni,MM,MA
Vice Chairperson III	: Lusia Adinda Lebu Raya, SPd, MM
Vice Chairperson IV	: Dr. Chairul Amri
Vice Chairperson V	: Bahaludin Surya
Honorary Secretary	: Dr. Roy Tjiong
Vice Honorary Secretary I	: Dr. Ramona Sari
Vice Honorary Secretary II	: Ocena Yusrina
Vice Honorary Secretary III	: Retno Widowati
Honorary Treasure	: Dra. Henny Ida Astuti
Vice Honorary Treasure I	: Alfiantono, MBA
Vice Honorary Treasure II	: Hady Saparudin

SUPERVISORY BOARD

Chief	: Prof. DR. Prijono Tjiptoherijanto
Vice Chief	: Drs. Rizal Malik, MA
Member	: Prof. DR. Musdah Mulia,MA
	Drs. Wahzary Wardaya
	Dra. Ami Siamsidar Budiman, Msi

EXPERT COMMISSION (CHAIR PERSON)

Chairperson of Medical Expert	: Prof.DR.dr.Biran Affandi, SpOG (K)
Chairperson of Adolescent and Children	: Maesur Zacky, MA
Chairperson of Sexual and Reproductive Health	: Ir. Inne Silviane, MSc
Chairperson of Organization Development and Voluntary	: DR. Ichsan Malik, MSi
Chairperson of Legal and Ethic	: Teddy Soemantri, SH
Chairperson of Resources Mobilization	: Hj. Tetty Kadi Bawono